



LAPORAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2023

30 Januari 2024

KEMENRIAN AGAMA RI
2023

KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum wr. wb.*



Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridha-Nya Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran Balai Litbang Agama (BLA) Makassar Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja BLA Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam mengelola anggaran tahun 2023.

Laporan ini memuat capaian Perjanjian Kinerja, Pelaksanaan program dan kegiatan penelitian, pengembangan serta penunjang tuisi serta realisasi penyerapan anggaran. Dokumen ini juga menjabarkan berbagai prestasi yang telah dicapai oleh BLA Makassar dalam kurun waktu tahun 2023. Selain itu, dokumen ini juga berisi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta solusi pemecahannya.

Secara umum, pelaksanaan program dan pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dicapai dengan baik. Namun demikian kami menyadari masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sehingga beberapa kegiatan meskipun secara kuantitatif dapat terselesaikan dengan sempurna, namun secara kualitatif belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat atas arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan BLA Makassar Tahun 2023.

Kami berharap laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja BLA Makassar pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai amal usaha kita semua.

Wassalamu'alaikumwr. wb.



Makassar, 30 Januari 2024
Pjt. Kepala
Balai Litbang Agama Makassar

Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si

Kata Pengantar	... 1
Daftar isi	... 2

I. Pendahuluan	... 3
A. Latar belakang	... 3
B. Dasar Hukum	... 4
C. Maksud dan Tujuan	... 5
D. Ruang Lingkup Laporan	... 5
II. Profile Kelembagaan	... 6
A. Struktur Organisasi	... 6
B. Peta Wilayah Kerja	... 7
C. Data Pegawai	... 7
III. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023	... 8
A. Pagu Alokasi Anggaran dan Penyesuaian Pagu Tahun 2023	... 8
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	...13
IV. Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2023	...17
A. Capaian Sasaran Program Tahun 2023	...17
B. Capaian Output Program Tahun 2023	...88
C. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	...90
V. Kendala dan Tindak Lanjut	...91
A. Kendala	...91
B. Tindak Lanjut	...91
VI. Penutup	...92



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (BLA) Makassar adalah salah satu dari tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Ketiga UPT kelitbangan dalam struktur organisasinya, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Berdasarkan struktur sebagaimana dimaksud di atas, maka tugas dan fungsi dari BLA Makassar adalah melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Secara spesifik, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari BLA Makassar adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Agama pada wilayah kerja yang telah diatur dalam KMA Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Balai Litbang Agama Makassar menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi salah satu dari 3 (tiga) *outcome* yang dimuat dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat Tahun 2020-2025, yaitu "meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan".

Balai Litbang Agama Makassar secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas produk penelitian, pengembangan dan peningkatan efektifitas serta efisiensi pengelolaan administrasi. Berbagai usaha tersebut diarahkan pada pencapaian target kinerja program penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan, secara lebih spesifik kegiatan penelitian dan pengembangan

sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BLA Makassar dengan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, perlu disampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023, yang berisi tentang pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2023.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2014 tentang Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik pada Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;
16. Surat Edaran Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Capaian Kinerja Berbasis Anggaran Dan Fisik di Lingkungan Badan Litbang Dan Diklat.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Capaian Kinerja BLA Makassar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama Makassar selama tahun 2023;
2. Melaporkan capaian Kinerja Balai Litbang Agama Makassar selama tahun 2023 baik kepada internal Kementerian Agama maupun eksternal Kementerian Agama.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan evaluasi Kinerja Anggaran adalah Balai Litbang Agama Makassar mencakup pagu alokasi anggaran dan penyesuaian pagu atau revisi Anggaran, realisasi anggaran dan evaluasi kinerja anggaran yang terdiri dari capaian sasaran program, capaian output program dan nilai kinerja anggaran tahun 2023.

BAB II PROFIL KELEMBAGAAN

A. Sturuktur Kelembagaan

Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar adalah sebagai berikut:

Susunan Oranisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makssar.



Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan sebagaimana yang tercantum dalam PMA No. 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia

B. Peta Wilayah

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama sebagaimana yang



terumuskan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama,

mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan agama di bidang kehidupan beragama, pendidikan agama dan keagamaan, dan lektur keagamaan. Wilayah kerjanya meliputi dua belas provinsi, yaitu 1) Sulawesi Selatan, 2) Sulawesi Barat, 3) Sulawesi Tengah, 4) Sulawesi Tenggara, 5) Sulawesi Utara, 6) Gorontalo, 7) Kalimantan Timur, 8) Kalimantan Utara, 9) Maluku, 10) Maluku Utara, 11) Papua, dan 12) Papua Barat.

C. Data Jumlah Pegawai

Data pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Data Jumlah Pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2023

No.	Jumlah Pegawai (Orang)			Keterangan
	PNS	PPPK	NON PNS/ NPASN	
1.	33	3	11	

Tabel 3
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2023

No.	Jumlah Pegawai (Orang)			Keterangan
	Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2	22	11	

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN APBN TAHUN
ANGGARAN 2023

A. PAGU ALOKASI ANGGARAN DAN PENYESUAIAN TAHUN 2023

Alokasi anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tahun anggaran 2023 DIPA terakhir sebesar Rp. 14.529.441.000 (empat belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk DIPA Awal sebesar Rp. 16.293.366.000 (*enam belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*). Pagu Anggaran ini mengalami revisi dan refocusing sebanyak 10 kali, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1
Pergeseran Pagu Anggaran



Revisi pertama, kedua dan ketiga tidak mengalami perubahan pagu yaitu sebesar 16.293.366.000 (*enam belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Revisi empat dan lima mengalami penurunan sebesar 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*) sehingga pagu anggaran berkurang menjadi

15.693.366.000, - (*lima belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam rupiah*).

Revisi enam dan tujuh mengalami penurunan sebesar Rp. 120.887.000,- (*seratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga pagu anggaran berkurang menjadi Rp. 15.572.479.000,- (*lima belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*)

Revisi delapan dan sembilan juga mengalami penurunan sebesar Rp. 842.376.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 14.730.103.000,- (*empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu rupiah*).

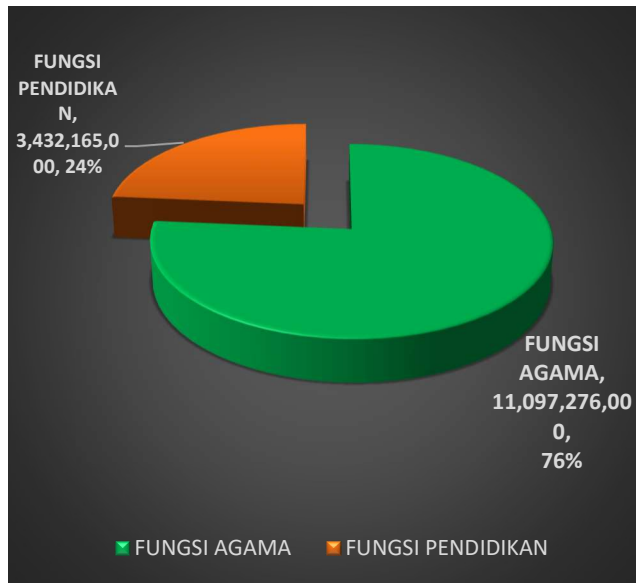
Revisi ke-sepuluh berkurang sebesar 200.662.000,- (*dua ratus juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah*) sehingga pagu berubah menjadi Rp. 14.529.441.000 (*empat belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Total anggaran berdasarkan PAGU akhir tersebut dapat dilihat dari beberapa kategori alokasi yaitu 1) Alokasi anggaran berdasarkan fungsi; 2) Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja; 3) Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan atau RO; 4) Alokasi Anggaran Berdasarkan Sub Output.

1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Alokasi Anggaran berdasarkan Fungsi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2
Grafik Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi



Berdasarkan Grafik ini, alokasi anggaran terbagi dalam dua fungsi yaitu Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Fungsi dengan presentase terbesar adalah fungsi Agama dengan 76 % atau Rp. 11.097.276.000,- (*sebelas milyar sembilan puluh*

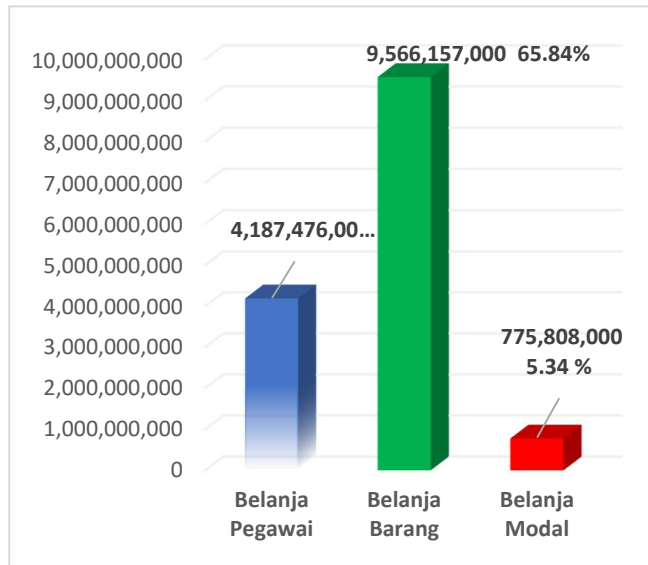
tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari total anggaran, dan fungsi Pendidikan 0,24% atau Rp. 3.432.165.000 (*tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*). Fungsi Agama meliputi kegiatan ; 1) Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Penelitian 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, sedangkan fungsi pendidikan meliputi 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2) Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Pendidikan Keagamaan.

2. Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3
Grafik Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan Grafik 3 ini, Belanja Barang mendapatkan persentase terbesar dengan 65,84% atau Rp. 9.566.157.000,- (*sembilan milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tujuh juta*),



milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tujuh juta), Belanja Pegawai mendapatkan anggaran Rp.4.187.476.000 (*empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) atau 28,82 % dari total Anggaran,

sedang belanja modal mendapatkan porsi anggaran yang paling kecil dengan nilai Rp. 775.808.000 (*tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah*) atau 5,34 %.

Belanja Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan PNS, Uang Makan, Lembur dan Tunjangan Kinerja. Sedangkan Belanja Barang meliputi kegiatan operasional perkantoran dan pemeliharaan kantor, penelitian dan pengembangan serta layanan kelitbangannya sedangkan belanja modal meliputi pengadaan barang yang menghasilkan aset.

3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Alokasi anggaran berdasarkan Kegiatan (Aktivitas dalam bahasa ADIK) dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1
Tabel Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

NO.	RINCIAN OUTPUT	PAGU	
1.	Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	2.555.292.000	17.70%
2.	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Managemen Organisasi	1.223.435.000	8.42%
3.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	2.543.052.000	17.50%
4.	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	7.318.549.000	50.37%
5.	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	889.113.000	6.12%
	Jumlah	14.529.441.000	100%

Tabel 1 di atas menunjukkan, dari segi besaran alokasi anggaran, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat mendapatkan porsi anggaran paling besar dengan nilai Rp. 7.318.549.000 (*tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) atau 50.37%, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan menempati urutan kedua dengan besaran anggaran Rp. 2.555.292.000,- (*dua milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) atau 17.70%, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan menempati posisi ketiga dengan besaran anggaran Rp. 2.543.052.000,- (*dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah*) atau 17,50%, kegiatan penelitian Penelitian dan Pengembangan Lektur,

Khazanah Keagamaan dan Managemen Organisasi *mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.223.435.000 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau 8.42% dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektor Khazanah Pendidikan Keagamaan menempati posisi terakhir dengan besaran anggaran Rp. 889.113.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah) atau 6,12%.*

Besarnya anggaran pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat disebabkan karena kegiatan ini menampung empat KRO (Klasifikasi Rincian Output) yaitu 1) Layanan Perkantoran mencakup belanja gaji dan tunjangan, uang makan, lembur, tunjangan kinerja, belanja operasional, perkantoran; 2) Layanan Umum yang di dalamnya berisikan dukungan terhadap manajemen satker; 3) Layanan Sarana Internal; dan 4) Layanan prasarana Internal. Poin tiga dan empat ini berisikan belanja modal pengadaan barang dan jasa.

B. REALIASI ANGGARAN TAHUN 2023

Anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2023 (Berdasarkan Data om-SPAN Per 31 Desember 2023) dari Pagu Anggaran sebesar Rp 14.529.441.000,- (*empat belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*) telah direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 14.526.264.647,- (*empat belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau 99,98%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.176.353 (*tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*).

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

NO.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	4.187.476.000	4.186.728.089	99.98%
2.	Belanja Barang	9.563.728.558	9.563.728.558	99.97%
3.	Belanja Modal	775.808.000	775.808.000	100.00%
Jumlah		14.529.441.000	14.526.264.647	99,98%

Tabel di atas menunjukkan, belanja modal menempati persentase tertinggi dengan serapan anggaran 100,00% dengan sisa anggaran. Belanja pegawai dengan realisasi 99,98% dan menyisakan Rp. 747.911,- (*tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) dan belanja barang dengan realisasi 99,97% menyisakan 2.428.442,- (*dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*)

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Realisasi anggaran berdasarkan fungsi yang dialokasikan dalam DIPA Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar terdiri dari 2 (dua) fungsi yaitu Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4
Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

No.	FUNGSI	ALOKASI	REALISASI	%
1.	Fungsi Agama	11.097.276.000	11.096.027.777	99,98
2.	Fungsi Pendidikan	3,432,165,000	3.430.236.870	99.94
Jumlah		14.529.441.000	14.526.264.647	99,98

Tabel di atas menggambarkan fungsi agama dengan pagu Rp. 11.097.276.000,- (*sebelas milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) merealisasikan anggaran sebesar Rp. 11.096.027.777 (*sebelas milyar sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dengan persentase 99,98% dan fungsi Pendidikan dengan pagu 3.432.165.000,- (*tiga milyar empat ratus*

tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 99.94%.

3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Dalam DIPA Balai Litbang Agama Makassar tahun 2023 anggaran terdistribusi kedalam 5 (lima) kegiatan/rincian Output (RO) sebagaimana pada table berikut:

Tabel 5
Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output (RO)

NO.	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1.	Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	2.555.292.000	2.555.083.615	99.99 %
2.	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1.223.435.000	1.223.429.500	100.00%
3.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	2.543.052.000	2.541.127.037	99.92%
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	7.318.549.000	7.317.514.662	99.99%
5.	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	889.113.000	889.109.833	100.00%
	Total ...	14.529.441.000	14.526.264.647	99.98%

Tabel di atas menunjukkan rata-rata realisasi anggaran berada pada 99.98%. Realisasi rincian output (RO) tertinggi adalah Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi dan Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah

Pendidikan Keagamaan dengan realisasi anggaran 100%, diurutkan kedua rincian output Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat dan Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan dengan 99.99%, dan yang terakhir rincian output (RO) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan 99.92%

BAB IV
EVALUASI KINERJA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. Capaian Sasaran Program Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Litbang Agama Makassar tahun 2023 diukur dengan melihat dan membandingkan antara target capaian indikator sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan realisasi program yang telah dicapai.

Target dan realisasi kinerja Balai Litbang Agama Makassar tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan (<i>policy paper</i>)	3	7	120%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	100%	100%	100%
		Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	1	1	100%
Nilai Rata-Rata Sasaran Kegiatan					106.66%
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan	4	5	120%

	pengembangan dan kebijakan	dan Manajemen Organisasi yang menghasilkan kebijakan(<i>policy paper</i>)			
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	100%	100%	100%
		Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang layak diajukan memperoleh HAKI	1	1	100%
Nilai Rata-Rata Sasaran Kegiatan					120%
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan(<i>policy paper</i>)	3	4	120%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan	100%	100%	100%
Nilai Rata-Rata Sasaran Kegiatan					110%
4	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan Bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Jumlah penelitian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan(<i>policy paper</i>)	1	1	100%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang	100%	100%	100%

		Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan			
Nilai Rata-Rata Sasaran Kegiatan					100.00%
5	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	100%	100%	100%
		Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar	4	4	100%
Nilai Rata-Rata Sasaran Kegiatan					100%
6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	95,70%	99.98	104,36%
Nilai Rata-Rata Sasaran Kegiatan					104.36%
7	Meningkatnya aset yang diinventarisasikan BMN	Persentase aset yang diinventarisasikan BMN	80%	80%	100.00%
					100.00%
8	Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	100%	100%	100%
Nilai Rata-Rata Sasaran Kegiatan					100%
9	Meningkatnya ASN yang profesional	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori tinggi (minimum 81)	95,00%	92.00%	96.84%
		Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	85,00%	83.00%	97.64%

Nilai Rata-Rata Sasaran Kegiatan	97.24%
Nilai Rata-Rate Keseluruhan = 938,25 : 9	104,25%

Adapun capaian kinerja Balai Litbang Agama Makassar berdasarkan sasaran program/kegiatan dan indikanor kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Kebijakan.

- Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (*policy paper*)



Pada indikator kinerja ini Balai Litbang Agama Makassar tahun 2023 menarget 3 (satu) policy paper, dan dapat merealisasikan 7 (Tujuh) dokumen policy paper, dengan pencapaian nilai kinerja 120%. Adapun policy Papernya adalah:

- 1) Evaluasi kebijakan terkati layanan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Program Revitalisasi KUA di Sulawesi Barat.

Rekomendasi :

1. Menanamkan nilai strategis instrumental KUA Revitalisasi yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong.

a. Nilai Integritas

Nilai ini terkait pada konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sebagai ASN Kementerian Agama. Integritas merupakan kesatuan kata dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku seseorang secara bertanggungjawab. Bentuk penjabaran nilai integritas antara lain dapat dipercaya, sadar hak dan kewajiban serta bertanggungjawab.

b. Nilai Etos Kerja

Nilai etos kerja terkait dengan semangat kerja tinggi yang menjadi ciri khas dan keyakinan ASN Kementerian Agama.

Etos kerja seseorang berkaitan dengan kepribadian, perilaku dan karakter individu yang bersangkutan. Etos kerja antara lain terdiri dari nilai daya saing, kreatif, mandiri, inovatif dan produktif.

- c. Nilai Gotong Royong
Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS, JFU dan seluruh perangkat SDM di KUA saling bersinergi mewujudkan KUA revitalisasi.

Ketiga nilai strategis instrumental tersebut merupakan nilai yang menjadi modal bagi ASN Kementerian Agama khususnya bagi ASN yang menjadi SDM dalam pengembangan KUA revitalisasi demi menjamin tercapainya tujuan revitalisasi KUA.

2. Strategi Penguatan KUA melalui 6 (enam) Strategi Revitalisasi KUA, yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
 - Dalam transformasi kelembagaan di program revitalisasi KUA diperlukan rancang bangun perluasan fungsi dan peningkatan kualitas Layanan KUA yang dilengkapi dengan standar prosedur dan peta proses bisnis yang terukur;
 - Pemenuhan sarana dan prasarana KUA secara berkesinambungan baik itu terhadap KUA yang telah direvitalisasi maupun KUA Yang belum direvitalisasi;
 - Pengembangan layanan berupa inisiatif dari KUA dalam perluasan fungsi KUA berdasarkan PMA No.34 Tahun 2016, seperti dialog keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, konsultasi keluarga dan pengamanan asset wakaf, baik itu yang dilakukan secara institusi KUA maupun dalam bentuk kerjasama lintas sektoral dengan pihak ketiga;
 - Implementasi KUA sebagai Pusat Layanan Keagamaan dan Rumah Moderasi Beragama di Kecamatan.
- b. Penyempurnaan Standar Pelayanan
 - Pelatihan service excellence secara menyeluruh bagi pegawai KUA dengan jabatan JFU maupun petugas front

office yang diinisiasi oleh Kanwil Kementerian Agama maupun Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan;

- Penyempurnaan Standar Pelayanan berupa digitalisasi layanan kepada masyarakat;
- Kementerian Agama agar menerapkan layanan operasional standar pada semua aspek layanan masyarakat, dalam hal ini perlu dilakukan peningkatan kapasitas atau capacity building bagi seluruh ASN yang ada di KUA Kecamatan.

c. Transformasi Digital

- Digitalisasi Layanan Pendaftaran nikah melalui SIMKAH;
- Mengoptimalkan penggunaan display standing di KUA revitalisasi.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Memberikan intervensi pada program prioritas nasional melalui strategi berupa peningkatan SDM KUA melalui capacity building;

- Peningkatan kapasitas SDM pada KUA Kecamatan dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis program layanan agar terbentuk pribadi ASN yang mempunyai integritas dan kepribadian pengabdikan masyarakat dengan mengedepankan aspek layanan berkualitas pada setiap program layanan;
- Peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi SDM KUA meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio-kultur;
- Pembentukan Pokja Revitalisasi KUA hingga tingkat Kabupaten.

e. Penguatan Regulasi

- Penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Revitalisasi KUA;

- (2) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja KUA secara Nasional sehingga terdapat penyelarasan terkait regulasi SDM di seluruh KUA
- f. Penguatan dan Integrasi Data
- Digitalisasi Arsip KUA. Berupa melakukan proses scan data KUA secara periodik dan berkelanjutan sehingga dapat terbentuk dokumen digital;
 - Pemenuhan alat pengolahan data termasuk PC dan Scener yang berkesesuaian sehingga bisa termanfaatkan dengan maksimal.
3. Penetapan Kualifikasi Standar dalam Pemilihan/Penetapan KUA yang di Revitalisasi.

Dalam penetapan KUA yang dipilih untuk dilakukan revitalisasi adalah berdasarkan pemenuhan kualifikasi standar program revitalisasi KUA antara lain meliputi ketersediaan sarana prasarana pendukung serta ketersediaan SDM dengan distribusi sesuai dengan ketentuan revitalisasi KUA.

4. KUA menjalin Kerjasama Lintas Sektoral dan Penguatan Program Kerja Revitalisasi.

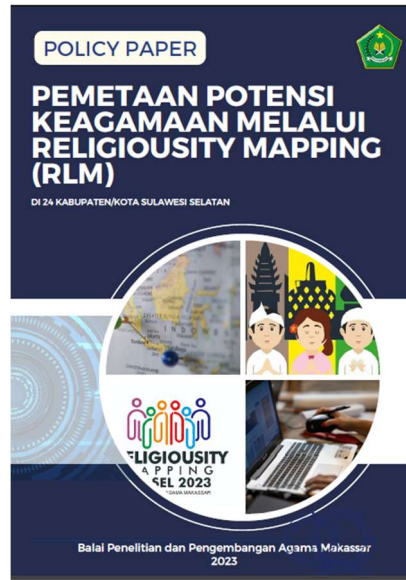
Menjalin kerjasama dalam penguatan program revitalisasi KUA merupakan salah satu hal yang dapat mendukung terlaksanannya revitalisasi KUA dengan lebih optimal. Membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak serta kerja sama lintas sektoral bukanlah hal yang mudah, namun dibutuhkan suatu usaha serta rencana untuk menjalin setiap kegiatan lintas sektoral ini.

Penguatan program kerja revitalisasi merupakan salah satu rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan di KUA, karena dengan merancang hingga pelaksanaan program kerja yang terarah akan lebih fokus pada pencapaian tujuan revitalisasi KUA. Selain itu diperlukan pelibatan masyarakat dan penguatan jejaring

lokal dengan prinsip kemitraan strategis dan kesetaraan sehingga KUA dapat menghadirkan layanan yang ringkas, cepat dan tepat.

2) Pemetaan Potensi Keagamaan Melalui Religiosity Mapping.

Rekomendasi :



Merujuk pada hasil pengukuran pemetaan potensi keagamaan melalui religiosity mapping yang dilakukan terhadap 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang diberikan, yakni:

- Penguatan jejaring antar penyuluh KUA, PIC data kabupaten/kota, Kasi Bimas.

Membangun sinergitas antar satuan atau unit kerja Kementerian Agama juga membangun kerja sama lintas sektoral sangat dibutuhkan guna mendukung terlaksananya pemetaan potensi keagamaan, terutama dalam proses pengumpulan data agar data yang tersedia di bank data merupakan data real dari observasi enumerator.

- Penguatan program kerja revitalisasi merupakan salah satu rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan di KUA, karena dengan merancang hingga pelaksanaan program kerja yang terarah akan lebih fokus pada pencapaian tujuan revitalisasi KUA. Selain itu diperlukan pelibatan masyarakat dan penguatan jejaring lokal dengan prinsip kemitraan strategis dan kesetaraan sehingga KUA dapat menghadirkan layanan yang ringkas, cepat dan tepat.
- Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam implementasi IT.

Dalam pengelolaan Data Potensi Wilayah Kerja Penyuluh terutama di era saat ini, maka seluruh sumber daya manusia

(SDM) yang berada di Kantor Urusan Agama sebagai unjuk tombak dalam mengawal ketersediaan data keagamaan sudah seyogyanya dilakukan peningkatan SDM melalui capacity building, terutama melalui program pendidikan atau pelatihan implementasi IT serta peningkatan kompetensi lainnya, di antaranya kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio-kultur.

Dengan adanya peningkatan SDM ini, diharapkan para penyuluh dapat memaksimalkan pengelolaan Data Potensi Wilayah Kerja Penyuluh yang merupakan cikal-bakal pemetaan potensi keagamaan, sehingga data fisik yang dimiliki dapat dikelola agar termanfaatkan lebih baik terutama dalam mendorong lahirnya kebijakan berbasis kebutuhan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

- Penguatan dan integrasi data (ketersediaan arsip digital potensi keagamaan) di setiap kabupaten/kota.

Tahapan setelah jejaring antar satuan atau unit kerja terjalin dan meningkatnya kemampuan SDM di KUA, maka dipandang perlu untuk melakukan penguatan dan integrasi data. Dengan ketersediaan arsip digital pemetaan potensi keagamaan, maka data dan informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat dalam pemenuhan hal terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketersediaan arsip digital pemetaan potensi keagamaan juga memudahkan masyarakat dalam mencari tahu lebih detail data potensi wilayah yang dimiliki oleh seluruh kabupaten/kota, misalnya membantu dalam pengambilan Keputusan terhadap pemilihan strategis lokasi sekolah, atau sebagai starting point dalam penentuan penyaluran bantuan pembangunan rumah ibadah atau pemerataan fasilitas umum.

- Merumuskan Standard Operasional Procedure (SOP), modul, dan instrument pengukuran pemetaan potensi keagamaan melalui

religiousity mapping disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan data di setiap daerah.

Kebijakan ini merujuk pada perluasan aspek yang dicatat dan diperhatikan bagi setiap penyuluh dalam membuat Data Potensi Wilayah Kerja Penyuluh sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS. Di mana setiap penyuluh diarahkan mengisi data sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan. Sehingga, setiap instrumen yang telah disepakati adalah instrumen yang kelak datanya tersedia, di mana setiap instrumen memiliki nilai bebas untuk terus ditinjau kevalidannya, sehingga data yang diolah dan divisualisasikan dalam peta keagamaan betul-betul merupakan potret peta keagamaan wilayah tersebut.

Selain instrumen, perlu adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) yang terarah dan sistematis terkait pengukuran potensi keagamaan berbasis peta keagamaan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) dengan format rencana aksi Bimbingan Teknis (Bimtek) serta modul dan tutorial pembuatan dan pelaksanaan pengukuran peta keagamaan. Sehingga, proses implementasi peta keagamaan dapat terlaksanakan sesuai dengan standarisasi baku yang efektif dan efisien.

- Menyusun strategi penganggaran pengukuran pemetaan potensi keagamaan melalui religiousity mapping secara nasional bagi setiap satuan kerja di bawah naungan Kementerian Agama
Sebagai tindak lanjut, setelah instrumen dan SOP pemetaan potensi keagamaan telah ditentukan, selanjutnya adalah mewajibkan setiap satuan kerja di bawah naungan Kementerian Agama untuk mengimplementasikannya dalam program kerjanya. Para stakeholder Kementerian Agama harus kembali duduk Bersama untuk membahas bagaimana perencanaan program kerja tersebut dapat terselenggara, pembentukan tim

kerja pemetaan potensi keagamaan yang disahkan melalui Surat Keputusan dari kantor Kementerian Agama, terlaksananya penandatanganan Mou antara tim teknis dengan stakeholder Kementerian Agama.

Selain membahas hasil teknis dalam penyelenggaraan pemetaan potensi keagamaan, dipandang penting untuk membahas strategi pengalokasi anggaran pengukuran pemetaan potensi keagamaan, mengingat luasnya cakupan setiap daerah pada setiap kabupaten/kota yang akan diobersvasi selama proses pengumpulan data pemetaan potensi keagamaan berlangsung.

Seluruh stakeholer terkait dapat membahas secara detail terkait penganggaran guna memaksimalkan proses pengumpulan data pemetaan potensi keagamaan, terutama dalam mengkaji ketersediaan SDM yang akan dilibatkan selama obersvasi berlangsung, termasuk di dalamnya pengkajian honor dan uang harian yang disesuaikan dengan time schedule pengumpulan data pemetaan potensi keagamaan.

- 3) Evaluasi kebijakan terkait layanan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Program Revitalisasi KUA di Sulawesi Selatan.

Rekomendasi :

- Menanamkan nilai strategis instrumental KUA Revitalisasi yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong.



a. Nilai Integritas

Nilai ini terkait pada konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sebagai ASN Kementerian Agama. Integritas merupakan kesatuan kata dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku seseorang secara bertanggungjawab.

Bentuk penjabaran nilai integritas antara lain dapat dipercaya, sadar hak dan kewajiban serta bertanggungjawab.

b. Nilai Etos Kerja

Nilai etos kerja terkait dengan semangat kerja tinggi yang menjadi ciri khas dan keyakinan ASN Kementerian Agama. Etos kerja seseorang berkaitan dengan kepribadian, perilaku dan karakter individu yang bersangkutan. Etos kerja antara lain terdiri dari nilai daya saing, kreatif, mandiri, inovatif dan produktif.

c. Nilai Gotong Royong

Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS, JFU dan seluruh perangkat SDM di KUA saling bersinergi mewujudkan KUA revitalisasi.

Ketiga nilai strategis instrumental tersebut merupakan nilai yang menjadi modal bagi ASN Kementerian Agama khususnya bagi ASN yang menjadi SDM dalam pengembangan KUA revitalisasi demi menjamin tercapainya tujuan revitalisasi KUA.

▪ Strategi Penguatan KUA melalui 6 (enam) Strategi Revitalisasi KUA, yaitu:

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

- 1) Dalam transformasi kelembagaan di program revitalisasi KUA diperlukan rancang bangun perluasan fungsi dan peningkatan kualitas Layanan KUA yang dilengkapi dengan standar prosedur dan peta proses bisnis yang terukur;
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana KUA secara berkesinambungan baik itu terhadap KUA yang telah direvitalisasi maupun KUA Yang belum direvitalisasi;
- 3) Pengembangan layanan berupa insiatif dari KUA dalam perluasan fungsi KUA berdasarkan PMA No.34 Tahun 2016, seperti dialog keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, konsultasi keluarga dan pengamanan asset wakaf,

- baik itu yang dilakukan secara institusi KUA maupun dalam bentuk kerjasama lintas sektoral dengan pihak ketiga;
- 4) Implementasi KUA sebagai Pusat Layanan Keagamaan dan Rumah Moderasi Beragama di Kecamatan.
- b. Penyempurnaan Standar Pelayanan
- 1) Pelatihan service excellence secara menyeluruh bagi pegawai KUA dengan jabatan JFU maupun petugas front office yang diinisiasi oleh Kanwil Kementerian Agama maupun Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan;
 - 2) Penyempurnaan Standar Pelayanan berupa digitalisasi layanan kepada masyarakat;
 - 3) Kementerian Agama agar menerapkan layanan operasional standar pada semua aspek layanan masyarakat, dalam hal ini perlu dilakukan peningkatan kapasitas atau capacity building bagi seluruh ASN yang ada di KUA Kecamatan.
- c. Transformasi Digital.
- 1) Digitalisasi Layanan Pendaftaran nikah melalui SIMKAH;
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan display standing di KUA revitalisasi.
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia
- 1) Memberikan intervensi pada program prioritas nasional melalui strategi berupa peningkatan SDM KUA melalui capacity building;
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM pada KUA Kecamatan dilakukan melalui program Pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis program layanan agar terbentuk pribadi ASN yang mempunyai integritas dan kepribadian pengabdian masyarakat dengan mengedepankan aspek layanan berkualitas pada setiap program layanan;
 - 3) Peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi SDM KUA meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio-kultur;

- 4) Pembentukan Pokja Revitalisasi KUA hingga tingkat Kabupaten.
- e. Penguatan Regulasi
- 1) Penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Revitalisasi KUA;
 - 2) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja KUA secara Nasional sehingga terdapat penyelarasan terkait regulasi SDM di seluruh KUA
- f. Penguatan dan Integrasi Data
- 1) Digitalisasi Arsip KUA. Berupa melakukan proses scan data KUA secara periodik dan berkelanjutan sehingga dapat terbentuk dokumen digital;
 - 2) Pemenuhan alat pengolahan data termasuk PC dan Scener yang berkesesuaian sehingga bisa termanfaatkan dengan maksimal.
- Penetapan Kualifikasi Standar dalam Pemilihan/Penetapan KUA yang di Revitalisasi.
 Dalam penetapan KUA yang dipilih untuk dilakukan revitalisasi adalah berdasarkan pemenuhan kualifikasi standar program revitalisasi KUA antara lain meliputi ketersediaan sarana prasarana pendukung serta ketersediaan SDM dengan distribusi sesuai dengan ketentuan revitalisasi KUA
 - KUA menjalin Kerjasama Lintas Sektoral dan Penguatan Program Kerja Revitalisasi
 Menjalin kerjasama dalam penguatan program revitalisasi KUA merupakan salah satu hal yang dapat mendukung terlaksanannya revitalisasi KUA dengan lebih optimal. Membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak serta kerja sama lintas sektoral bukanlah hal yang mudah, namun dibutuhkan suatu usaha serta rencana untuk menjalin setiap kegiatan lintas sektoral ini.
 Penguatan program kerja revitalisasi merupakan salah satu rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan di KUA, karena

dengan merancang hingga pelaksanaan program kerja yang terarah akan lebih fokus pada pencapaian tujuan revitalisasi KUA. Selain itu diperlukan pelibatan masyarakat dan penguatan jejaring lokal dengan prinsip kemitraan strategis dan kesetaraan sehingga KUA dapat menghadirkan layanan yang ringkas, cepat dan tepat.

4) Penguatan Moderasi Melalui Festival Musik Moderasi Beragama Bagi Kalangan Generasi Z.

Rekomendasi :



Festival Musik Moderasi Beragama merupakan suatu alternatif kebijakan yang dapat dilakukan dalam penguatan moderasi beragama yang dapat menyentuh masyarakat secara langsung khususnya di kalangan generasi Z dan milenial. Melalui tulisan ini, rekomendasi kebijakan yang ditawarkan yaitu:

1. Menjadikan kegiatan festival musik moderasi beragama menjadi salah satu pilot project dalam penguatan moderasi beragama di kalangan generasi Z dan milenial.
2. Mengakselerasi kegiatan festival musik moderasi beragama dengan penerapan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan edukatif, kultural dan interaktif yang telah dijadikan pondasi dalam pelaksanaan kegiatan festival musik moderasi beragama.
3. Mengeksplere kegiatan kreatif lainnya yang melibatkan peran generasi Z dan milenial secara langsung sebagai upaya penguatan moderasi beragama.

5) Asistensi Rumah Moderasi Beragama di IAIN Kendari.

Rekomendasi :



Melihat hasil-hasil kendala yang telah diungkapkan oleh para peserta asistensi rumah moderasi beragama, maka dapat diidentifikasi Rekomendasi sebagai berikut:

1. Political Will

Disaat nomenklatur dan ruangan sudah ada, maka tugas dari para anggota rumah moderasi beragama mulai bergerak memberikan ide/gagasan dalam

pelatihan moderasi beragama kepada para dosen maupun mahasiswa dengan melakukan sosialisasi secara bertahap.

2. Menciptakan Jejaring.

Tentu dalam melakukan sosialisasi rumah moderasi beragama harus menjalin Kerjasama atau menciptakan jejaring antar instansi. Dimulai dari melakukan Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, maupun Kantor Wilayah Kendari sebagai stakeholder dan juga kampus/LP2M sebagai internalnya.

3. Advokasi Duta Moderasi Beragama.

Dengan ketidakjelasan tugas dan fungsi dari advokasi duta moderasi beragama, maka sebaiknya mulai menciptakan kembali program secara bertahap dengan berkerjasama dengan Balai Litbang Agama Makassar, dimana tugas advokasi duta nanti mencoba untuk mendorong spirit moderasi beragama di sekolah-sekolah.

4. Integrasi Nilai Moderasi Beragama ke Kurikulum

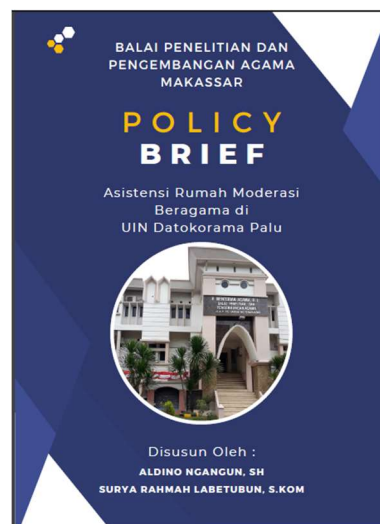
Kampus IAIN Kendari menyusun sebuah kurikulum dengan mencoba menyisipkan materi moderasi beragama didalam mata pelajaran yang lain.

5. Roadmap Moderasi Beragama.

Menyusun roadmap moderasi beragama untuk menguji tingkat pemahaman moderasi beragama terkhususnya mahasiswa baru yang nantinya akan diberikan sebuah treatment jika ditemukan indikasi intoleransi di mahasiswa baru tersebut.

6) Asistensi Rumah Moderasi Beragama di UIN Datokorama Palu.

Rekomendasi ;



Merunut berbagai permasalahan yang telah diungkapkan oleh para stakeholder, makadapat diidentifikasi rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Aktor

- Perlu melakukannya identifikasi aktor dengan cara melakukan pemetaan pemahamanmoderasi beragama baik terhadap mahasiswa baru maupun terhadap dosen secaraberkelanjutan yang bertujuan menyokong visi sekaligus menyokong perubahangagasan. Pemetaan penting dalam membuat kegiatan sosialisasi moderasi beragamakarena dapat membantu indikator pengukuran dalam menentukan tingkatpemahaman keagamaan moderat di kalangan mahasiswa dan dosen di kampus UINDatokorama Palu.
- Melakukan sosialisasi dan penguatan moderasi beragama dengan melakukan kajiankeagamaan di kampus dan melihat sejauh mana tingkat pemahaman keagamaanmoderat berdasarkan klasifikasi metodologi sosialisasi aktor.

- o Penguatan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan moderasi beragama terhadap mahasiswa maupun dosen menggunakan treatment yang berbeda sesuai dengan bidang mata kuliah mereka masing-masing.

2. Penguatan Kelembagaan.

Pentingnya program kerja moderasi beragama tentu harus segera dilakukan dengan aksi demi terciptanya pemetaan dan pelatihan yang maksimal di kampus. Melakukan revitalisasi struktur kelembagaan dengan membuat tim audience ke rektor bisa lebih meyakinkan visi moderasi beragama yang saat ini dijalankan secara bersama di lingkungan kampus UIN Datokoroma Palu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dan keberhasilan program. Institusi yang kuat akan memberikan struktur, dukungan dan kohesi yang diperlukan untuk menjaga momentum program dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul.

3. Penguatan Networking

Jejaring lintas sektor menjadi komponen kunci dalam membangun dan mengembangkan program kerja, terutama dalam konteks seperti program kerja moderasi beragama yang melibatkan berbagai entitas dan pemangku kepentingan. Dengan terjalinnya kerjasama antara Rumah Moderasi Beragama, LP2M, antar fakultas, mahasiswa, dan Balai Litbang Agama Makassar, maka program kerja moderasi keagamaan dapat berdampak lebih luas dan berkelanjutan.

7) Efektivitas Pelatihan Moderasi Beragama Bagi Asn di Lingkungan Kementerian Agama.

Rekomendasi :

Komitmen Kebangsaan.

Komitmen kebangsaan memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Berikut beberapa kebijakan yang bisa dipertimbangkan:

1. Memperkuat pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, pluralisme, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Ini bisa membantu membentuk pemahaman yang lebih baik tentang identitas nasional.
2. Mendorong dialog terbuka dan konstruktif antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk membangun pemahaman, menghormati perbedaan, dan mencari titik kesamaan.
3. Memperkuat lembaga-lembaga yang mendukung nilai-nilai kebangsaan seperti media, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan agama.
4. Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokratisasi, termasuk pemilihan umum, diskusi publik, dan kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingga memperkuat rasa memiliki terhadap negara dan membangun kesadaran akan pentingnya komitmen kebangsaan.
5. Pemimpin politik, agama, dan sosial harus memainkan peran aktif dalam mempromosikan kesatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap semua elemen masyarakat.
6. Memastikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan bagi semua kelompok dalam masyarakat dapat membantu mengurangi ketegangan dan ketidakpuasan yang mungkin memicu ketidakpatuhan terhadap komitmen kebangsaan.
7. Membangun kebijakan yang inklusif dan mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat. Memperhatikan aspirasi dan kepentingan semua pihak dapat membantu membangun kesepakatan bersama dalam mendukung kesatuan nasional.

Toleransi

Untuk mengatasi masalah kurangnya toleransi dalam kehidupan bernegara, diperlukan serangkaian kebijakan yang bertujuan

membangun lingkungan yang inklusif dan menghormati perbedaan. Beberapa solusi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain:

1. Pendidikan Multikultural: Memperkuat kurikulum sekolah dengan pendidikan yang mendorong pemahaman tentang keberagaman budaya, agama, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini dapat membentuk generasi yang lebih toleran dan inklusif.
2. Kebijakan Anti Diskriminasi: Menegakkan kebijakan yang melarang diskriminasi dalam segala bentuk, baik itu dalam akses terhadap layanan publik, kesempatan kerja, atau Pendidikan.
3. Menetapkan hukuman yang tegas bagi pelanggaran diskriminasi.
Promosi Dialog Antar-Kelompok: Mendukung program-program dialog antar-kelompok yang bertujuan membangun pemahaman dan toleransi. Ini bisa berupa lokakarya, forum, atau kegiatan lain yang membawa bersama kelompok-kelompok yang berbeda untuk berdiskusi.
4. Kebijakan Inklusi Sosial: Mendorong kebijakan yang memastikan partisipasi penuh dari semua kelompok dalam proses pembuatan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan.
5. Pelatihan dan Kesadaran: Menyelenggarakan pelatihan tentang toleransi, kesadaran budaya, dan keberagaman bagi aparat pemerintah, pendidik, dan tenaga kerja di sektor publik dan swasta. Ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.
6. Kampanye Publik: Mengadakan kampanye publik yang berfokus pada nilai-nilai inklusif, kesetaraan, dan pentingnya toleransi dalam membangun masyarakat yang harmonis.
7. Penguatan Keadilan Sosial dan Ekonomi: Mendorong kebijakan yang memastikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peluang bagi semua kelompok dalam masyarakat. Keadilan sosial dapat mengurangi ketimpangan yang sering kali menjadi pemicu ketidakmampuan untuk menerima perbedaan

Anti Kekerasan.

Penerapan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk anti kekerasan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, mengurangi tingkat kekerasan, serta memberikan perlindungan dan dukungan ketertiban pada masyarakat. Penguatan anti kekerasan, beberapa kebijakan dan langkah-langkah bisa diterapkan:

1. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dengan menguatkan undang-undang yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya.
2. Mengintegrasikan pendidikan tentang anti-kekerasan ke dalam kurikulum sekolah dan program-program pendidikan masyarakat. Kampanye kesadaran publik dan penyuluhan mengenai dampak kekerasan serta pentingnya melaporkan kekerasan perlu ditingkatkan.
3. Membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan komunitas untuk mengatasi akar penyebab kekerasan, menciptakan lingkungan yang lebih aman, dan memberikan dukungan yang komprehensif bagi masyarakat.
4. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, dan rentan terhadap kekerasan, termasuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan akses yang setara terhadap sumber daya.
5. Menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan akses terhadap layanan dan membangun jaringan dukungan yang lebih luas.

Penghargaan Terhadap Budaya Lokal

Penerapan kebijakan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan penghargaan dan pelestarian budaya lokal, serta memperkuat identitas kultural dan kesatuan masyarakat dalam menghargai keberagaman yang ada. Untuk meningkatkan penghargaan terhadap budaya lokal dan mengatasi dampak negatif dari kurangnya

penghargaan terhadapnya, beberapa kebijakan yang dapat diterapkan antara lain:

1. Memasukkan pendidikan tentang budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah, termasuk sejarah, seni, bahasa, dan nilai-nilai budaya. Mendukung penelitian dan pengembangan ilmiah terhadap budaya lokal.
2. Menyelenggarakan acara dan festival budaya lokal, pameran seni, dan pertunjukan tradisional untuk memperkenalkan warisan budaya kepada masyarakat luas dan wisatawan.
3. Memperkuat undang-undang yang melindungi warisan budaya, situs bersejarah, bahasa, dan praktik budaya. Menetapkan kebijakan untuk mempromosikan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
4. Mendorong partisipasi aktif komunitas dalam pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya lokal. Memberdayakan masyarakat untuk menjadi pemelihara dan pelaku utama dalam melestarikan warisan mereka.
5. Membangun kerjasama antara pemerintah, lembaga budaya, sekolah, universitas, dan LSM untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap budaya lokal.
6. Mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis budaya, seperti kerajinan tangan tradisional, kuliner lokal, pariwisata budaya, dan seni pertunjukan. Ini bisa memperkuat ekonomi lokal sambil mempromosikan budaya.
7. Menggunakan teknologi untuk mempromosikan budaya lokal, seperti melalui situs web, aplikasi, atau media sosial untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya.
8. Mendorong program pertukaran budaya antarwilayah atau antarnegara untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman, ide, dan pemahaman antarbudaya.

Efektivitas Pelatihan

Dengan pendekatan yang komprehensif, fokus pada keterampilan praktis, dan evaluasi berkelanjutan, program pelatihan moderasi beragama bagi pegawai pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, beragam, dan damai dalam mengelola

keragaman agama dalam masyarakat. Program pelatihan moderasi beragama bagi pegawai pemerintah merupakan langkah yang penting untuk memastikan pengetahuan yang tepat, penghormatan terhadap keragaman agama, serta keterampilan dalam mengelola keragaman agama di masyarakat. Beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan ini adalah:

1. Merancang kurikulum yang komprehensif dan terstruktur untuk pelatihan, mencakup pemahaman mendalam tentang agama-agama utama, prinsip-prinsip moderasi, dialog antaragama, serta pemahaman terhadap hukum dan kebijakan terkait.
2. Melibatkan tokoh-tokoh agama dan praktisi agama dalam memberikan materi pelatihan. Mereka dapat memberikan wawasan yang kaya akan pengalaman praktis dan nilai-nilai agama yang sejati.
3. Mengadopsi pendekatan pelatihan yang interaktif, seperti studi kasus, permainan peran, dan diskusi kelompok, untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi yang kompleks.
4. Memperkuat keterampilan komunikasi antaragama, negosiasi, serta penyelesaian konflik untuk membantu pegawai pemerintah dalam mengelola situasi yang membutuhkan pemahaman yang luas dan sensitif terhadap keberagaman.
5. Menggalang kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda untuk memastikan konsistensi dalam pemahaman dan implementasi prinsip moderasi beragama.
6. Menyelenggarakan evaluasi rutin terhadap pelatihan untuk mengevaluasi dampaknya pada perilaku dan keputusan pegawai pemerintah. Pemantauan yang berkelanjutan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas.
7. Memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pegawai pemerintah mengakomodasi keragaman agama dan kepercayaan, serta mendorong partisipasi seluruh masyarakat.

8. Menyediakan sumber daya yang cukup baik dari segi anggaran, fasilitas, dan pengawas untuk mendukung pelaksanaan program pelatihan yang efektif dan berkelanjutan.

- **Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.**

Semua program kegiatan dan produk kelitbang telah dipublikasikan di website Balai Litbang Agama Makassar baik dalam bentuk berita maupun naskah policypaper dengan alamat <https://www.blamakassar.web.id/>.

- **Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI.**

Target yang diberikan kepada Balai Litbang Makassar dalam



dokumen perjanjian kinerja untuk indikator kinerja bidang bimas Agama dan layanan keagamaan terkait HAKI adalah 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen sehingga persentasenya adalah 100%. Dokumentasinya HAKI dalam bentuk buku SIEDI (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi)

2. Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian

Pengembangan dan Kebijakan

- **Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang menghasilkan kebijakan(policy paper)**

Pada indikator kinerja ini Balai Litbang Agama Makassar menarget 3 (satu) policy paper, dan dapat merealisasikan 4 (empat) buah policy paper, dengan pencapaian nilai kinerja 120%.

Adapun policy papernya berjudul:

1. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Rekomendasi Kebijakan

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023, maka rekomendasi kebijakan yang ditawarkan yaitu :

- 1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar secara intens melakukan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain dengan mengikutsertakan masyarakat.
- 2) Melibatkan organisasi kemasyarakatan keagamaan dan kepercayaan yang memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam upaya melakukan penguatan moderasi beragama.
- 3) Sesuai dengan Pasal 9 Perpres Nomor 58 tahun 2023, pembentukan Sekretariat Bersama agar dilakukan segera dengan melibatkan seluruh pihak terkait baik itu ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pembentukan ekosistem dan kelompok strategis moderasi beragama ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kesimpulan

Program penguatan moderasi beragama sangat krusial dilakukan dengan melibatkan para penyelenggara negara di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, terutama terkait sosialisasi kerangka konseptual dan kerangka kerja di setiap unit instansi yang berbeda-beda yang telah diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023.

Pada akhirnya, penguatan Moderasi Beragama harus selalu berorientasi pada upaya perlindungan hak beragama serta hak beribadah umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan.

2. Advokasi Pengelolaan Moderasi Beragama di PTKN

Deskripsi Masalah

Konsep KKN Nusantara Moderasi Beragama ini sudah dirancang sebagaimana mestinya. Ada sekitar enam puluh (60) perguruan tinggi yang sudah menyatakan kesediannya untuk ikut



terlibat di program KKN Nusantara Moderasi Beragama. Adanya harapan juga dimana akan ada enam perwakilan agama yang ikut terlibat di kegiatan kali ini, sehingga harmoni dalam keberagaman di Tana Toraja nantinya bisa betul-betul tercapai.

Meskipun konsep KKN Moderasi Beragama sudah ada tetapi tentu tidak mudah dalam merealisasikannya secara penuh. Hal itu karena masih banyaknya kekurangan yang terdapat di dalamnya yang harus dibedah satu-satu dan mencoba untuk dicarikan sebuah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar hadir dan mengundang para akademisi yang berasal dari IAIN Parepare, mulai dari LP2M, Dosen, maupun para pengurus KKN Moderasi Beragama untuk bersama-sama membahas mengenai konsep KKN Moderasi Beragama ke depan nantinya seperti apa. Kegiatan sharing session kembali lagi menggunakan konsep GROW yang biasanya digunakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

Konsep GROW sangat baik untuk mencari tau terlebih dahulu tujuan dan kendala apa saja yang bisa membuat kegiatan KKN Moderasi Beragama ini nantinya tidak berjalan secara maksimal. Dengan konsep GROW ini nantinya kita bisa menghasilkan sebuah output lanjutan buat Balai Penelitian dan Pengembangan

Agama Makassar maupun Kampus IAIN Parepare. Gambaran konsep GROW bisa dilihat dari tabel berikut:



Beberapa permasalahan yang di kemukakan oleh para stakeholder dalam KKN Nusantara Moderasi Beragama, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Moderasi Beragama masih belum maksimal sehingga konsep belum matang dalam melaksanakan KKN Nusantara Moderasi Beragama.
- b) Terdapat beberapa mahasiswa intoleran yang tidak mau membaur dengan beberapa orang yang memiliki pandangan berbeda.
- c) Adanya shock culture yang terjadi di beberapa mahasiswa.

Rekomendasi

Melihat kendala yang telah diungkapkan oleh para stakeholder, maka dapat diidentifikasi rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan mapping terlebih dahulu kepada setiap mahasiswa untuk tujuan pembacaan tiap karakter mahasiswa, yang nantinya mahasiswa tersebut akan di treatment pembekalan wacana maupun pembekalan skill.
2. Mendorong ko-eksistensi mahasiswa dalam merasakan hidup berdampingan dan memahami mengenai Tana Toraja yang sangat terkenal sebagai lumbung toleransi dengan sebuah evidence kuat selama KKN berlangsung, baik itu berbentuk jurnal, foto, dan video.
3. Melakukan pertemuan atau dialog antar agama di lokasi KKN menjadi suatu awal yang baik dalam melakukan treatment untuk semua mahasiswa dalam bersosialisasi baik diantara

sesama mahasiswa maupun dengan masyarakat sekitar lokasi KKN.

3. Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Generasi Z

Deskripsi Masalah

Penguatan moderasi beragama di kalangan Generasi Z akan memberikan dampak yang baik terutama penciptaan harmonisasi di masyarakat, kenyamanan dan kemaslahatan hidup beragama berbangsa dan bernegara. Olehnya ketika penguatan moderasi beragama ini ditinggalkan maka akan menimbulkan masalah yang tentu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Permasalahan yang terjadi diantaranya; adanya polarisasi dan konflik (agama, budaya, etnis), ekstrimisme dan radikalisme, meredupnya dialog dan komunikasi dikalangan masyarakat, munculnya persepsi negatif terhadap agama lain, dan kurangnya penghargaan terhadap keberagaman.

Polarisasi dan Konflik rentang terjadi, tanpa pemahaman yang kuat tentang moderasi beragama, masyarakat cenderung terpecah belah antara kelompok yang berbeda pandangan. Ini bisa memicu konflik internal di masyarakat, memperdalam kesenjangan antara keyakinan dan memperkeruh hubungan antar kelompok.

Ekstremisme dan radikalisasi akan banyak muncul menyusul ketiadaan moderasi yang dapat membuka jalan bagi pengaruh kelompok-kelompok yang memiliki pandangan ekstrem, meningkatkan risiko radikalisasi di kalangan generasi muda. Tanpa penguatan moderasi, generasi Z mungkin lebih rentan terhadap ideologi radikal.

Kurangnya pemahaman tentang moderasi agama bisa membuat sulit bagi individu untuk berdialog dengan orang-orang yang memiliki keyakinan atau pandangan berbeda. Ini dapat menghambat komunikasi yang efektif dan pengertian yang lebih mendalam antarindividu dan kelompok.

Persepsi Negatif terhadap agama lain sewaktu-waktu dapat terjadi, generasi Z yang tidak terpapar pada penguatan moderasi berisiko memiliki persepsi negatif terhadap agama atau keyakinan lain. Hal ini bisa memperkuat stereotip dan prasangka terhadap kelompok agama tertentu.

Menurunnya pandangan dan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman akan melunturkan wawasan beragama terutama kerukunan. Ketika moderasi agama tidak ditekankan, kurangnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat bisa menjadi masalah. Generasi Z mungkin cenderung kurang terbuka terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan.

Menguatkan moderasi beragama di kalangan Generasi Z dapat membantu membangun pondasi yang lebih kuat untuk toleransi, dialog antarkelompok, pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman, serta menurunkan risiko konflik dan radikalisasi.

Rekomendasi Kebijakan

Langkah-langkah kebijakan yang dapat dijadikan rekomendasi dalam memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penguatan moderasi beragama di kalangan generasi Z.

1. Untuk polarisasi dan konflik yang mungkin muncul akibat ketiadaan moderasi beragama, langkah kebijakan:
 - Memperkuat pendidikan yang mendorong pemahaman mendalam tentang berbagai kebudayaan dan agama. Program-program ini dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pengertian yang lebih baik tentang perbedaan.
 - Mendorong dialog terbuka dan konstruktif antara kelompok agama yang berbeda. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti forum diskusi, seminar, atau pertemuan antaragama

untuk membangun pemahaman dan kerjasama yang lebih baik.

- Kolaborasi antara organisasi agama untuk mempromosikan nilai-nilai yang universal, seperti perdamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman, dapat membantu mengurangi konflik.
 - Sekolah dan lembaga pendidikan dapat memasukkan kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Hal ini bisa mempersiapkan generasi muda untuk hidup dalam masyarakat yang beragam.
 - Mengedukasi individu, terutama Generasi Z, tentang pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini dapat membantu mengurangi penyebaran informasi yang memicu polarisasi dan konflik.
 - Pemimpin agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mempromosikan perdamaian, membangun jembatan antarkelompok, dan menekankan pentingnya moderasi dalam beragama.
2. Untuk mengatasi permasalahan ekstremisme dan radikalisme, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- Melalui sistem pendidikan yang kuat, bisa dimasukkan kurikulum yang mengajarkan pemahaman yang lebih luas tentang moderasi, toleransi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini membantu mencegah pemikiran ekstrem sejak dini.
 - Membangun komunitas yang kuat dengan mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya. Ini membantu mencegah terisolasi dan rentan terhadap pengaruh ekstrem.
 - Mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan analitis di sekolah dan lembaga pendidikan untuk membantu generasi

- muda dalam mengidentifikasi propaganda, retorika ekstremis, serta menilai informasi yang mereka terima.
- Mendorong akses yang lebih luas terhadap informasi yang seimbang dan faktual. Ini membantu mengurangi penyebaran propaganda ekstremis dan mengembangkan kesadaran akan pemikiran yang sehat.
 - Kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok agama untuk menciptakan program-program yang mencegah radikalisme serta memberikan bantuan kepada individu yang rentan terpengaruh.
 - Menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi individu yang terpapar ideologi ekstrem. Pendekatan ini membantu mereka menemukan jalan keluar dan membangun pemahaman yang lebih sehat tentang nilai-nilai hidup yang moderat.
 - Mendorong pengembangan identitas yang positif dan kuat di kalangan generasi muda, sehingga mereka lebih tahan terhadap pengaruh ekstremis yang mencoba memanfaatkan ketidakpastian atau ketidakpuasan.
 - Kerjasama lintas negara untuk menghadapi sumber-sumber ekstremisme yang melintasi batas negara dan membangun strategi bersama untuk menanggulangi radikalisme.
3. Untuk mengatasi ketidakmampuan berdialog, langkah-langkah yang dapat dilakukan:
- Memasukkan pelatihan keterampilan komunikasi, termasuk keterampilan mendengarkan aktif, pemahaman empati, dan kemampuan berbicara dengan sopan, dalam kurikulum pendidikan. Ini membantu mempersiapkan generasi muda untuk berdialog dengan efektif.

- Mendorong pengembangan keterampilan empati yang memungkinkan individu untuk melihat dari perspektif orang lain. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana orang merasa didengar dan dipahami.
- Membangun budaya di masyarakat yang menghargai dialog dan perbedaan pendapat. Mengadakan forum-forum terbuka, diskusi kelompok, atau lokakarya yang mendorong dialog terbuka dan berpikiran terbuka.
- Mendorong penggunaan bahasa yang menghormati perbedaan pendapat dan menghindari konfrontasi. Mengajarkan cara berbicara yang mempromosikan pertukaran gagasan tanpa merendahkan atau mengintimidasi.
- Mendorong peran pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan figur publik untuk menjadi contoh dalam berdialog yang konstruktif dan terbuka terhadap pandangan yang berbeda.
- Memanfaatkan platform online, seperti forum diskusi atau aplikasi yang didedikasikan untuk dialog terbuka, di mana individu dari latar belakang yang berbeda dapat berinteraksi dan bertukar pendapat.
- Menciptakan ruang aman di mana orang merasa nyaman untuk berbicara tentang pandangan mereka tanpa takut akan penghakiman atau hukuman sosial.
- Memasukkan pelajaran tentang keberagaman budaya dan nilai-nilai multikulturalisme dalam kurikulum pendidikan. Ini membantu memperluas pemahaman tentang perbedaan dan menghargai keragaman.
- Melibatkan pendidikan, budaya, dan kesadaran akan pentingnya berdialog dengan baik, kita dapat membantu mengatasi ketidakmampuan berdialog dan membangun komunikasi yang lebih konstruktif di masyarakat.

4. Untuk mengatasi persepsi negatif terhadap agama lain, langkah-langkah yang dapat dilakukan:
- Memperkenalkan pendidikan yang mendalam tentang berbagai agama di dunia, dengan fokus pada persamaan, nilai-nilai universal, dan praktik-praktik yang mengedepankan kedamaian dan toleransi.
 - Mendorong dialog terbuka dan saling pengertian antara anggota berbagai agama. Ini dapat dilakukan melalui acara-acara komunitas, seminar, atau forum diskusi yang mendorong pertukaran pemikiran positif.
 - Mendorong pertemuan langsung antara individu dari berbagai agama. Pengalaman ini dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka, serta memperkuat pemahaman akan kesamaan dan keberagaman.
 - Memaksimalkan media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi. Promosi narasi yang seimbang dan informatif tentang agama-agama yang berbeda dapat membantu mengurangi stereotip negatif.
 - Mendorong kerjasama antara komunitas-komunitas agama dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan proyek-proyek yang memperkuat kesamaan nilai-nilai kemanusiaan di antara agama-agama tersebut.
 - Mengintegrasikan pelajaran tentang nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan penolakan terhadap diskriminasi dalam kurikulum pendidikan.
 - Pemimpin agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mempromosikan toleransi dan mengurangi ketegangan antaragama dengan memberikan contoh dan arahan yang positif.
 - Membangun jaringan antaragama untuk mendukung saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian di antara kelompok-kelompok agama.

- Melibatkan edukasi, dialog terbuka, pengalaman langsung, dan promosi nilai-nilai universal, dapat membantu mengurangi persepsi negatif terhadap agama lain dan memperkuat harmoni antaragama dalam masyarakat.
5. Untuk mengatasi kurangnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan:
- Memasukkan pelajaran tentang nilai-nilai multikulturalisme, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kurikulum pendidikan. Ini membantu membentuk sikap yang terbuka dan menghargai keberagaman.
 - Mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman budaya, agama, bahasa, dan tradisi melalui acara-acara budaya, festival, atau kegiatan komunitas yang merayakan keberagaman.
 - Mendorong interaksi yang lebih banyak antara individu dari latar belakang yang berbeda. Ini bisa dilakukan melalui pertukaran budaya, kunjungan ke tempat-tempat ibadah atau komunitas, atau kegiatan relawan bersama.
 - Menggalakkan kerjasama antara kelompok-kelompok dari latar belakang yang berbeda untuk bekerja sama dalam proyek-projek sosial atau kemanusiaan. Ini membantu membangun kesadaran akan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama.
 - Fokus pada pembentukan karakter yang menghargai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini dilakukan dengan mempromosikan nilai-nilai ini di sekolah, keluarga, dan komunitas.
 - Memaksimalkan media dalam membentuk sikap dan persepsi. Promosi narasi yang menekankan pentingnya keberagaman, kesetaraan, dan toleransi di media membantu membangun kesadaran.

- Menyediakan pelatihan untuk memahami dan mengelola konflik yang mungkin timbul dari perbedaan budaya. Ini membantu mempersiapkan individu untuk berinteraksi secara positif dengan keberagaman.
- Pemimpin dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar. Mereka dapat memainkan peran dalam mempromosikan sikap yang menghargai keberagaman melalui pidato, aksi nyata, dan peran sebagai contoh positif.

4. Pemanfaatan Media Digital (Spbe) Untuk Penguatan Sistem Tata Kelola Organisasi Satuan Kerja Kementerian Agama Makassar.

Rekomendasi Kebijakan



Hasil dari penelitian didapatkan rumusan rekomendasi strategis untuk kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan untuk perbaikan dalam implementasi SPBE di wilayah kerja Balitbang Agama Makassar khususnya yang pastinya akan juga mempengaruhi untuk percepatan di tingkat Kementerian Agama. Rekomendasi kebijakan tersebut

meliputi :

- 1) Membuat peraturan/kebijakan yang mengikat penggunaan aplikasi/ media digital di kantor.
- 2) Melakukan penanaman mindset kerja berbasis teknologi
- 3) Melakukan perbaikan dan pembaharuan secara bertahap pada infrastruktur.
- 4) Melakukan Pengelolaan jaringan secara terpusat (sentralisasi)

- 5) Menguatkan sarana dan prasarana penggunaan media digital/media sosial serta melakukan inovasi dan kreatifitas dengan konten-konten yang mudah dipahami masyarakat.
- 6) Mengembangkan aplikasi SIMKAH dengan integrasi data yang lebih baik serta kolaborasi data dengan instansi lain.
- 7) Melakukan perbaikan Layanan terkait perizinan dan penjaminan produk halal.
- 8) Membuat kebijakan tentang tugas Kemenag sebagai wali data: poduk halal, haji dll.
- 9) Memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebuhan organisasi dengan updating teknologi yang berkembang.
- 10) Membentuk tim koordinasi secara fungsi baik yang terstruktur maupun adHoc.
- 11) Melakukan evaluasi dan audit terhadap aplikasi yang ada serta membuat/ membangun aplikasi yang powerflul.
- 12)Membentuk Pusat Data dan Informasi tingkat Kementerian.
- 13)Melakukkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait layanan administrasi.
- 14)Melakukan manajemen dengan baik terkait manajemen IT dengan mengadopsi framework yang sudah establish.
- 15)Mengadopsi Audit TIK / standar yang sudah ada.
- 16)Melakukan pembenahan terhadap proses dan layanan menjadi Interaksi.
- 17)Melakukan penambahan SDM IT yang kompeten.
- 18)Melakukan pelatihan pada pegawai yang menangani IT.
- 19)Menetapan standar kompetensi digital ditingkat Kementrian
- 20)Sosialisai dan pelatihan untuk penggunaan aplikasi/ teknologi Baru.

5. Penguatan SDM ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Melalui SMART ASN.

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan peningkatan SDM ASN menuju SMART ASN dapat berfokus pada beberapa aspek penguatan kompetensi dan kinerja. Beberapa kebijakan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yang dilakukan, yaitu:

- 1) Pelatihan dan pengembangan: Pemerintah dapat melaksanakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk ASN. Pelatihan ini dapat meliputi peningkatan keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman ASN dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.
- 2) Evaluasi kinerja yang objektif: Sistem evaluasi kinerja yang jelas dan objektif perlu diterapkan. Hal ini memungkinkan penilaian yang adil terhadap kinerja ASN dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Evaluasi kinerja yang baik juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait promosi dan pengembangan karir.
- 3) Kriteria promosi yang transparan: Diperlukan kriteria promosi yang jelas dan transparan agar ASN memiliki kesempatan yang adil untuk naik pangkat dan meningkatkan jabatan mereka. Kebijakan ini dapat didasarkan pada pencapaian kinerja, pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang relevan.
- 4) Penghargaan dan insentif: Pemberian penghargaan dan insentif kepada ASN yang mencapai hasil yang luar biasa dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan profesionalisme. Insentif ini dapat berupa bonus kinerja, penghargaan non-finansial, atau kesempatan untuk mengikuti program pengembangan lanjutan.
- 5) Rotasi jabatan: Melalui kebijakan rotasi jabatan, ASN dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan

dan keterampilan di berbagai bidang tugas. Rotasi jabatan dapat membantu memperluas

Kesimpulan

Penguatan ASN dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo merupakan keniscayaan yang terus dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan pelayanan terbaik. Berbagai program terus dilakukan Kementerian Agama dalam rangka pengembangan SDM menuju SMART ASN.. Bukan hal yang mudah mengetahui ASN sudah menuju SMART atau belum. Beberapa hal yang perlu dilakukan penguatan SDM ASN dalam aspek integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai informasi teknologi dan bahasa asing, berjiwa hospitably, berjiwa enterpreneurship, dan networking.

1. Perhatian terhadap dukungan Manajemen: Manajemen yang baik sangat penting dalam meningkatkan kinerja ASN. Pimpinan perlu memberikan dukungan yang memadai, memfasilitasi pelatihan dan pengembangan, serta memberikan umpan balik konstruktif secara teratur.
2. Tugas dan Tanggung Jawab yang konsisten dan jelas: Setiap ASN harus memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya. Membangun Komunikasi terkait ekspektasi dengan jelas dan harus memahami prioritas pekerjaan para ASN.
3. Pelatihan dan Pengembangan: Kejelasan pelatihan dan program pengembangan untuk ASN agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ASN. Hal ini akan membantu ASN untuk lebih kompeten dalam pekerjaan mereka dan meningkatkan kualitas kinerja.
4. Pemberian Umpan Balik: Membangun umpan balik secara teratur kepada ASN tentang kinerja mereka. Penghargaan dan pujian atas prestasi yang baik sangat penting dilakukan, termasuk memberikan saran konstruktif untuk perbaikan.

Umpan balik yang jelas dan terarah akan membantu ASN memahami harapan dan meningkatkan kinerja.

5. Penghargaan dan Insentif: Penghargaan atau insentif kepada ASN yang mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi yang luar biasa sangat penting dilakukan. Ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN.
6. Pembinaan Karir: Membuka kesempatan untuk pembinaan karir bagi ASN yang ingin meningkatkan kompetensi dan naik pangkat. Program pembinaan karir dapat membantu ASN mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.
7. Kolaborasi dan Tim Kerja: Mendorong kerja sama dan kolaborasi antara ASN dan antara unit kerja dapat membantu meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Mengadakan pertemuan tim, diskusi, dan proyek bersama dapat memperkuat hubungan antar anggota tim dan meningkatkan produktivitas.
8. Evaluasi Kinerja yang Teratur: Lakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk mengukur pencapaian tujuan dan hasil kerja ASN. Evaluasi kinerja yang adil dan obyektif dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan kesempatan untuk memberikan dukungan tambahan jika diperlukan.
9. Lingkungan Kerja yang Sehat: Penuhi kebutuhan dasar ASN seperti fasilitas yang memadai, lingkungan kerja yang nyaman, dan keseimbangan kerja-hidup yang baik. Memberikan dukungan yang tepat dalam hal kesejahteraan dan kesehatan mental juga penting untuk menjaga kinerja yang baik.
10. Penerapan Teknologi: Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja ASN. Pastikan ASN mendapatkan

pelatihan dan akses yang memadai ke alat dan aplikasi yang diperlukan

- **Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi**

Semua program kegiatan dan produk kelitbang telah dipublikasikan di website Balai Litbang Agama Makassar baik dalam bentuk berita maupun naskah policypaper dengan alamat <https://www.blamakassar.web.id/>.

- **Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang layak diajukan memperoleh HAKI.**

Target yang diberikan kepada Balai Litbang Makassar dalam



dokumen perjanjian kinerja untuk indikator kinerja bidang Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi terkait HAKI adalah 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen sehingga persentasenya adalah 100%.

Dokumennya HAKI dalam bentuk Aplikasi SIPATTUJU (Sistem Informasi Pelaporan

Teratur dan dan Jitu)

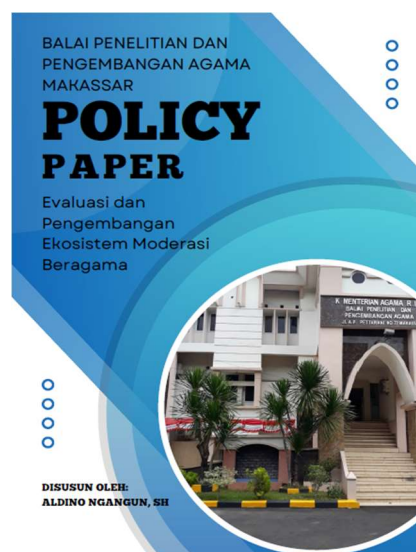
- **Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan.**
- Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan(*policy paper*).

Pada indikator kinerja ini Balai Litbang Agama Makassar menarget 3 (satu) policy paper, dan dapat merealisasikan 4 (satu) buah policy paper, dengan pencapaian nilai kinerja 120%.

Adapun policy papernya berjudul:

1. Evaluasi Pengembangan Ekosistem Moderasi Beragama

Deskripsi Masalah



Saat ini moderasi beragama mendapatkan tone negatif di masyarakat. Efek negatif yang terjadi karena adanya kalangan tertentu yang menguasai dunia digital dan menyebarkan sebuah persepsi mengenai moderasi beragama yang jauh dari konteksnya. Dengan media digital segala sesuatu bisa dengan cepat

menyebarkan dan mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Banyak ketidaktahuan masyarakat mengenai moderasi beragama inilah yang membuat moderasi beragama sukar diterima di masyarakat. Perlu adanya sebuah solusi perubahan yang dilakukan agar pemahaman moderasi beragama betul-betul tersampaikan di semua kalangan. Dengan menjalin sebuah kerjasama dengan berbagai pihak tentu bisa menjadi langkah awal untuk bersama-sama menyelesaikan isu permasalahan yang terjadi saat ini.

Maka dari itu Balai Litbang Agama Makassar pun mengundang berbagai pihak mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Balai Diklat Keagamaan Makassar, Kampus UIN Alauddin Makassar, dan Sekolah Madrasah Aliyah untuk ikut terlibat dalam mengevaluasi kondisi ekosistem moderasi beragama yang saat ini terjadi baik di internal maupun eksternal, GROW akan menjadi konsep dalam menyelesaikan permasalahan ini. Konsep GROW sendiri adalah sebuah konsep yang sering digunakan oleh Balai Litbang Agama Makassar dalam mencari permasalahan dan sebuah solusi dalam bentuk proyeksi ataupun

gambar dalam sebuah realitas yang saat ini terjadi. Gambaran hasil konsep GROW bisa dilihat dalam tabel berikut:



GROW model

Beberapa rangkuman permasalahan yang sering terjadi berdasarkan persepsi yang dikemukakan oleh para stakeholder, yaitu sebagai berikut:

- Permasalahan yang paling sering terjadi saat ini, yaitu masih banyak yang belum mengetahui tentang moderasi beragama terkhususnya di masyarakat. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi bertema moderasi beragama yang dilakukan, sehingga kata moderasi beragama masih terdengar awam di telinga masyarakat.
- Kurangnya gerakan dalam mempromosikan moderasi beragama di media sosial. Seringkali gerakan melalui media sosial ini masih terhalang karena belum adanya ide atau konsep yang benar-benar menarik yang siap disajikan ke masyarakat. Padahal media sosial adalah sebuah media online yang saat ini menjadi platform paling digandrungi oleh hampir seluruh kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa karena bisa diakses dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan gadget atau smartphone.
- Adanya beberapa anggapan dari kalangan tertentu terkhususnya di Kementerian Agama itu sendiri yang mengatakan kalau moderasi beragama itu hanya

sekedartoleransi, sehingga tiga indikator moderasi beragama yang lain tidak terimplementasikan secara seluruhnya. Dengan tidak terimplementasikan indikator yang lain, maka tidak jarang ditemukan beberapa kalangan masih bersifat tidak moderat.

- Munculnya rasa trauma dari kalangan minoritas. Beberapa kalangan minoritas terkadang belum mendapatkan tempat yang seharusnya mereka juga dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Mendapatkan perlakuan yang tidak mengenak dari beberapa kalangan mayoritas mengakibatkan trust issue berkelanjutan hingga saat ini.
- Masih masifnya gerakan Moderasi Beragama. Moderasi beragama saat ini masih banyak yang bersifat teori dan belum mencapai ke titik aplikasi. Belum adanya gerakan yang benar-benar aktif dalam menggaungkan moderasi beragama baik itu dari level pemerintahan maupun non pemerintahan, sehingga banyak beranggapan kalau moderasi beragama hanya akan berhenti di program semata tanpa adanya sebuah dampak yang signifikan.

Rekomendasi Kebijakan

Merunut berbagai permasalahan yang telah diungkapkan oleh para stakeholder, maka dapat diidentifikasi rekomendasi sebagai berikut:

1. Inseri, Melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan memperkenalkan lebih lanjut mengenai nilai-nilai moderasi beragama, sehingga masyarakat juga bisa lebih paham akan gambaran seperti apa moderasi beragama.
2. Memperluas Gerakan dengan melalui pelatihan berbasis moderasi, pembentuk kampung moderasi, podcast moderasi, dan jurnal bertemakan moderasi.
3. Gerakan Media Digital. Mengisi konten-konten dengan bertemakan moderasi beragama dan disajikan secara menarik baik melalui podcast di youtube, reels Instagram, vt tiktok, maupun media sosial lainnya.

4. Pemetaan. Melakukan pemetaan untuk mengetahui berapa persen tingkat pemahaman mengenai moderasi beragama dan menekan tingkat intoleran/tidak moderat terkhususnya di kalangan ASN Kementerian Agama.
5. Ruang Perjumpaan. Dengan membuat sebuah ruang perjumpaan baik itu melalui via online, forum discussion group, orientasi, maupun melakukan kegiatan di kampung moderasi.
6. Organic Agent Pengangkatan Organic agent yang telah mengikuti Training of Trainer moderasi beragama sebagai duta moderasi baik di sekolah, kampus, atau dilingkungan kerja Kementerian Agama.
7. Kolaborasi. Perlu adanya gerakan bersama dengan berbagai pihak baik pemerintahan maupun non pemerintahan untuk menghasilkan sebuah inspirasi bersama yang dapat berdampak lebih luas dan berkelanjutan kedepannya.

2. Asistensi Penyusunan Fiqhi Bunuh Diri

Deskripsi Masalah

Kasus bunuh diri yang terjadi di Gorontalo sepanjang tahun 2023 terjadi peningkatan. Sampai dengan bulan Agustus, total terdapat 30 kasus bunuh diri yang tersebar di hampir tiap wilayah di provinsi Gorontalo. Peningkatan kasus bunuh diri ini bahkan terbilang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang kerap menjadi daerah dengan kasus bunuh diri tertinggi di Indonesia (Tanipu, 2023). Dalam perkembangannya, kejadian bunuh diri tidak lagi dilakukan dengan menggunakan tali gantung namun lebih variatif dengan menggunakan racun bahkan senjata api. Meningkatnya peristiwa bunuh diri tentunya perlu ditindak lanjuti oleh beragam pihak guna menurunkan laju angka bunuh diri yang selalu meningkat di tiap bulan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 silam, angka bunuh diri di Provinsi Gorontalo mencapai peringkat ketiga secara nasional (Tanipu, 2023).

Upaya untuk mencegah kejadian bunuh diri telah direspon dan dilakukan oleh berbagai pihak. Kementerian agama Gorontalo misalnya, telah menyusun dan mengedarkan khutbah jumat tentang bunuh diri untuk disebarluaskan di tiap masjid yang berada di wilayah provinsi Gorontalo (Fitriani, 2023). Pemerintah provinsi Gorontalo pun turut terlibat dengan membuka layanan konseling gratis yang bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu, tenaga pendidik baik ditingkat SMP dan SMA diberikan pembekalan konseling untuk mencegah kejadian bunuh diri yang dilakukan pelajar (Pakaya, 2023). Di lingkup kampus, Universitas Negeri Gorontalo telah melakukan upaya pencegahan meningkatnya angka bunuh diri dengan memberikan layanan konseling psikolog yang disediakan pihak kampus agar bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. Upaya edukasi pun diberikan dengan menyebarkan konten tulisan dan mengisi seminar di berbagai media. Di kalangan jurnalis, semenjak bulan juni telah bersepakat untuk tidak lagi melakukan blow up berita tentang bunuh diri di media. Hal ini dilakukan guna menghindari kecenderungan orang terdorong melakukan upaya bunuh diri karena terpengaruhi (trigger) berita bunuh diri yang kerap diangkat dan tersebar secara masif. Meskipun upaya ini telah dilakukan, namun pada bulan Agustus justru terjadi peningkatan kejadian bunuh diri sebanyak enam kasus dalam sebulan. Hal ini menurut Funco Tanipu, mengindikasikan bahwa asumsi orang melakukan bunuh diri karena terpengaruh dengan konten berita bunuh diri yang kerap diviralkan, tidaklah memiliki relasi yang kuat.

Selain upaya yang telah dilakukan di atas, pihak UNG melalui Pusat Inovasi UNG (PIU) bekerjasama dengan Balai Litbang Kemenag Makassar, Bahtsul masail, serta Gusdurian, saat ini tengah berupaya menyusun fiqh pencegahan bunuh diri sebagai ikhtiyar dalam mencegah kejadian bunuh diri yang kerap terjadi di Gorontalo. Penyusunan fiqh bunuh diri sejatinya tidak hanya melibatkan kalangan tokoh agama, melainkan dari para ahli di bidang sosial, psikolog, tokoh

agama lintas iman, jurnalis, serta masyarakat. Penggunaan instrument hukum Islam/agama ini diharapkan bisa memberikan efek menurunkan angka bunuh diri di Gorontalo.

Aniq Nawawi selaku tim penyusun fiqh pencegahan bunuh diri sekaligus perwakilan dari Bahtsul masail mengungkapkan, penyusunan fiqh pencegahan bunuh diri dilakukan tidak saja mengedepankan aspek hukum yang terdiri dari kumpulan fatwa semata, namun berupaya melakukan pembaharuan dengan memadukan pendapat dari kalangan ahli lainnya. Hal ini bertujuan agar landasan fiqh yang tersusun lebih kaya dengan beragam pendekatan. Lebih lanjut, selain menggunakan pendekatan fiqh an sich yang cenderung menggunakan kaidah ushul fiqh, fiqh pencegahan bunuh diri turut juga memerhatikan peran-peran dari aktor yang berkontribusi terhadap kondisi sosial dan mental yang mentrigger orang untuk melakukan bunuh diri (Nawawi, 2023). Pada aspek inilah, produk fiqh pencegahan bunuh diri memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan produk fiqh lainnya. Hal ini terlihat karena muatan fiqh pencegahan bunuh diri tidak hanya menitikberatkan kepada pelaku, melainkan juga kepada pihak-pihak yang turut terlibat menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan tindakan bunuh diri. Adapun menurut Rilyanto Podungge selaku perwakilan dari majelis tarjih Muhammadiyah, perumusan fiqh pencegahan bunuh diri dengan mengadopsi Fiqh kontemporer memang dibutuhkan guna melibatkan peran dari beragam pihak guna menciptakan produk fiqh yang lebih progresif dan beragam perspektif dalam melihat sebuah permasalahan.

Dalam sesi workshop fiqh pencegahan bunuh diri yang dilaksanakan di hotel Aston, 18 September 2023, pihak penyelenggara melibatkan peserta yang terdiri dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama lintas iman, untuk bersama-sama memberikan tanggapan dan sumbangsih dalam penyusunan fiqh pencegahan bunuh diri. Dalam sesi tersebut,

perwakilan dari masing-masing pihak telah berupaya memberikan masukan serta tanggapannya dalam melihat fenomena bunuh diri yang terjadi sepanjang bulan Januari hingga September 2023.

Menurut Funco, fenomena bunuh diri mesti dilihat dari berbagai pendekatan guna melihat peristiwa bunuh diri tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Terdapat empat pendekatan yang mesti dipertimbangkan dalam hal merespon makin naiknya tindakan bunuh diri yang terjadi di masyarakat. (Tanipu, 2023) Keempat pendekatan tersebut yakni; pertama, pendekatan yuridis melalui aturan yang disusun sebagai respon dalam menanggulangi bunuh diri diperlukan. Kedua, pendekatan ruang yang perlu digunakan mengingat pelaku lebih banyak terjadi di kalangan rural. Ketiga, pendekatan actor guna melibatkan kalangan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk turut menyuarakan dan memberikan kesadaran ke masyarakat agar bisa bersama-sama mencegah terjadinya upaya bunuh diri. Keempat, pendekatan literasi untuk meningkatkan pemahaman orang dalam memahami peristiwa bunuh diri, terutama masyarakat yang cenderung membagikan peristiwa bunuh diri melalui sosial media dan cenderung menganggap hal tersebut sebuah kenormalan.

Mengenai kebutuhan regulasi yang bisa digunakan sebagai landasan yuridis dalam mencegah bunuh diri, Helmi Adam selaku tokoh masyarakat dan mantan politisi mengungkapkan bahwa sebelumnya, DPRD telah merumuskan perda nomor 12 tahun 206 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Perda tersebut menitikberatkan peran keluarga terutama orang tua agar tidak lalai dalam memelihara tumbuh kembang anak. Perda ini menurutnya bisa dimanfaatkan dengan membuat aturan turunan yang bisa mencegah aksi bunuh diri di masyarakat. Sayangnya memang, setelah perda tersebut telah disusun, implementasinya masih belum ada.

Selain aspek regulasi, kondisi sosial masyarakat turut menjadi perhatian dalam melihat fenomena bunuh diri. KH. Burhanudin Umar

selaku tokoh agama yang mewakili NU mengungkapkan, bahwa perubahan sosial masyarakat turut juga mendorong seseorang melakukan bunuh diri. Salah satu perubahan tersebut bisa terlihat dari perubahan peran sosial seorang ustadz di mata masyarakat. di zaman sekarang, ustadz hanya terbatas sebagai pendidik agama, dan bukan tokoh sentral di kalangan masyarakat bawah yang kerap dimintai nasehat atau sebagai konseling yang dipercayakan dimintai saran bagi masyarakat yang tengah menghadapi masalah. Peran inilah yang mulai tergerus. Padahal, Apabila peran ini masih terjaga, minimal orang yang memiliki kecenderungan diri masih bisa menemukan solusi lain atau berbagi masalah yang ia hadapi sehingga bisa dicegah untuk tidak melakukan aksi bunuh diri. Hal serupa juga diungkapkan Mu'in Mooduto selaku tokoh agama Islam. menurutnya, majelis taklim yang dulu menjadi wadah masyarakat dalam menimba ilmu agama serta menjalin silaturahmi, saat ini mulai jarang dilakukan masyarakat perkotaan. Padahal, majelis taklim berperan juga sebagai media untuk menjalin silaturahmi serta sharing antar sesama warga.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Zulkifli Tanipu selaku perwakilan akademisi UNG. dalam temuannya di lapangan, orang terdorong melakukan bunuh diri disebabkan faktor ekonomi sejauh ini masih menjadi alasan seseorang melakukan buuh diri. Hal ini memiliki korelasi dengan kondisi masyarakat Gorontalo yang cenderung sulit menemukan pekerjaan sesuai dengan UMR. Di sisi lain, kebutuhan mendasar yang kian hari mulai naik, serta tuntutan ekonomi, menyebabkan seseorang mudah terkena stress hingga depresi. Bila mentalnya tidak cukup kuat, maka orang tersebut terdorong melakukan bunuh diri karena dianggap sebagai solusi akhir dari permasalahan dan tekanan hidup yang tengah dihadapi. Meskipun demikian, apabila melihat keseluruhan kasus bunuh diri, faktor ekonomi bukanlah faktor dominan seseorang melakukan bunuh diri. diri. Sebab, rata-rata semua faktor memiliki kontribusinya masing-masing berdasarkan motif bunuh diri.

Di masyarakat, keluarga pelaku bunuh diri kadangkala memiliki pandangan yang berbeda terhadap pelaku bunuh diri. Temuan di lapangan menunjukkan, ada keluarga dari pelaku yang tidak mau mengakui tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Sebagai gantinya, keluarga menggunakan istilah gantung diri. Hal ini seolah memberikan distingsi antara bunuh diri dengan gantung diri. Sanksi sosial berupa dikucilkan atau menjadi objek buah bibir di masyarakat turut menjadi salah satu faktor anggota keluarga tidak mau, pelaku dicap sebagai orang yang melakukan bunuh diri dan lebih memilih menggunakan istilah gantung diri.

Hasil Asistensi

Selain mendengarkan beragam pendapat terkait fenomena bunuh diri dengan menggunakan sharing session, peserta juga dilibatkan untuk menganalisis lebih mendalam serta menyusun strategi dalam mencegah naiknya angka bunuh diri. Pada sesi ini, peserta dibagi dalam empat kelompok yakni komisi ekonomi dan hukum, komisi kesehatan, komisi agama sosial dan budaya, komisi pendidikan. Masing-masing komisi melakukan analisis dengan menggunakan teori U proses dan iceberg analysis. Berikut ini hasil temuan yang ditemukan komisi pendidikan dalam menganalisis lebih jauh mengenai fenomena bunuh diri yang terjadi di Provinsi Gorontalo.

Pola dan trend

- Masih ditemukan bullying di sekolah.
- Adanya krisis keteladanan di lingkungan rumah dan sekolah
- Kurangnya pendidikan agama.
- Kurangnya percaya diri.
- Adanya perubahan perilaku dalam menggunakan sosial media.
- Kurangnya tenaga psikolog dan BK di sekolah.
- Kurangnya pendidikan karakter.
- Kurangnya sistim manajerial.

Sebab dan akibat.

- Sistim budaya di sekolah.

- Keluarga dan guru belum menjadi teladan bagi anak.
- Kurikulum sekolah masih belum diperbaharui.
- Kurangnya tenaga psikolog dan BK di lingkup sekolah.
- Masyarakat masih belum memiliki literasi digital.

Mental model.

- Adanya sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan guru, orang tua, serta masyarakat terkait kesehatan mental.
- Guru serta orang tua masih belum memiliki kemampuan terkini dalam memahami perkembangan teknologi. Sehingga ketika ada anak yang menagis atau rewel, cukup diberikan HP.
- Sistem pendidikan masih belum menganggap teknologi sebagai bagian dari ekosistem kehidupan.

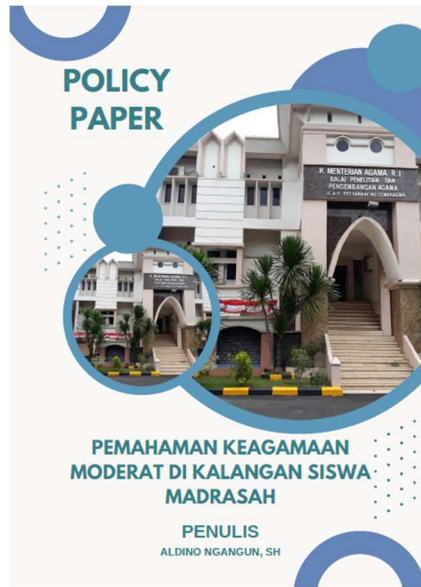
Mental model baru.

- Meningkatkan rasa peduli para orang tua, guru, dan masyarakat terhadap perkembangan anak.

Redesigning.

- Optimalisasi peran guru.
- Optimalisasi pendidikan karakter melalui kurikuler dan ekstrakurikuler.
- Optimalisasi kepedulian perwalian kelas.
- Pembatasan penggunaan gadget yang melibatkan guru dan orang tua ke dalam bentuk tata tertib sekolah.
- Grow up mentality.
- Menciptakan ruang bermain baru bagi anak-anak melalui TPA dan literasi yang tersebar di tiap kampung.
- Mengiisiasi campaign pengetahuan.

3. Pemahaman Keagamaan moderat Di Kalangan Siswa Madrasah Permasalahan



Meskipun beberapa penelitian mengemukakan bahwa adanya kontribusi pendidikan Islam mengenai moderasi beragama, tetapi tidak sedikit juga permasalahan yang mengakibatkan terjadinya kendala dalam pemahaman keagamaan moderat di sekolah madrasah. Permasalahan yang di rasakan mengenai pemahaman keagamaan moderat di kalangan siswa madrasah

yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemahaman yang belum seimbang. Pendidikan madrasah menekankan komponen teologis dan hukum agama tanpa memberikan penekanan yang cukup pada kualitas moderasi, toleransi, dan menghargai keberagaman, sehingga sebagian siswanya mungkin memiliki perspektif agama yang lebih ketat atau kaku.
- 2) Kurangnya Pengetahuan tentang Berbagai Agama dan Budaya. Siswa di madrasah mungkin tidak mempunyai banyak kesempatan untuk memahami dan berinteraksi dengan individu dan ide-ide dari latar belakang agama dan budaya lain, yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan stereotip.
- 3) Pengaruh Eksternal. Siswa di madrasah mungkin terpapar pada pengaruh luar seperti media sosial, organisasi radikal, atau pihak-

pihak yang berupaya mengarahkan mereka ke sudut pandang yang lebih ekstremis atau penuh kekerasan.

- 4) Tidak Menerima Pendidikan Multikultural. Ada kemungkinan bahwa madrasah tidak menawarkan pendidikan antar budaya yang memadai, sehingga kurang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap keragaman agama dan budaya.
- 5) Kepentingan Ideologi atau Kelompok Tertentu. Siswa mungkin dihadapkan pada tujuan atau filosofi organisasi tertentu, yang mungkin mengakibatkan interpretasi agama yang ekstrem.
- 6) Pengasingan dari Masyarakat Umum. Madrasah yang terlalu terisolasi dari komunitas luar mungkin memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang agama dan budaya lain.

Strategi yang melibatkan pendidik, sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Perlu adanya upaya untuk membekali siswa madrasah dengan pendidikan multikultural, pengetahuan agama yang seimbang, dan pelatihan yang diperlukan. Siswa bisa mendapatkan cara pandang yang lebih menerima serta toleransi dan menghargai keberagaman agama dan budaya dengan cara ini. Maka dari sangat dibutuhkannya agen dalam menyebarkan konsep moderasi beragama, sehingga tidak menghasilkan sebuah perspektif yang salah dalam beragama maupun dalam hidup bermasyarakat terlebih di lingkungan madrasah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa poin yang dapat didorong sebagai rekomendasi kebijakan dalam menjawab pemahaman keagamaan moderat di kalangan siswa madrasah:

1. Lanjutan Program. Setiap tahun melakukan regenerasi para agen moderasi beragama yang bertujuan agar program dalam menyuarakan mengenai moderasi beragama tetap eksis dan berkembang lingkungan sekolah madrasah.

2. Kurikulum Yang Seimbang. Kurikulum yang menyeimbangkan ilmu umum dengan ilmu agama harus diajarkan di madrasah. Siswa akan mendapatkan ilmu luas yang berguna dalam kehidupan sehari-hari serta pemahaman yang lebih mendalam tentang keimanannya melalui hal ini.
3. Ruang Pertemuan. Adanya ruang pertemuan antar agama melalui seminar, forum group discussion, dan moderation camp.
4. Kolaborasi. Adanya kolaborasi lebih meluas dari segala pihak dalam menyebarkan moderasi beragama baik di sekolah madrasah maupun ke sekolah umum. Moderasi beragama nantinya akan tersebar lebih luas lagi ke segala kalangan.

Kesimpulan

Dengan merekrut agen moderasi beragama untuk menjadi role model di sekolah madrasah tentu menjadi langkah awal yang sangat baik dalam menyebarkan konsep moderasi beragama. Fase siswa yang masih dalam pencarian jati diri tentu sangat mudah buat para penggiat agama masuk di dalamnya dan mengajarkan ajaran-ajaran keagamaan yang jauh dari konteksnya, sehingga moderasi beragama perlu hadir di tengah-tengahnya untuk mengurangi tingkat intoleransi dan meningkatkan pemahaman keagamaan yang moderat bagi seluruh siswa di madrasah.

4. Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa Baru

Deskripsi Masalah

Hasil pengukuran pemahaman moderasi beragama mahasiswa baru di perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah timur Indonesia yang dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama masih perlu terus dilakukan baik melalui sosialisasi, advokasi, atau melalui dialog-dialog.



Pada indikator komitmen kebangsaan masih terdapat mahasiswa yang berpendapat bahwa sistem demokrasi dapat bertentangan dengan agama, begitupun dengan

nasionalisme masih ada yang menyakini bertentangan dengan ajaran agama. Saya meyakini bahwa nasionalisme bertentangan dengan ajaran agama saya

Pada indikator toleransi, masih terdapat mahasiswa yang keberatan penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya, bahkan masih ada yang keberatan berdiskusi dengan penganut paham keagamaan yang berbeda dengan mereka. Dan masih terdapat mahasiswa yang keberatan dengan adanya pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya.

Sikap anti kekerasan, ada kecenderungan mahasiswa yang setuju aksi bom bunuh diri atas nama agama. Ini menunjukkan problem yang sangat besar terkait kerukunan, meskipun tidak secara masif yang cenderung setuju tetapi bibit-bibit aksi untuk melakukan bom bunuh diri masih ada yang dapat menimbulkan dampak sosial yang luar biasa.

Untuk indikator penghargaan terhadap tradisi lokal, mahasiswa cenderung setuju terhadap upaya-upaya pelestaria budaya lokal sebagai bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap tradisi kebudayaan yang bernuansa keagamaan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Secara umum pola pemahaman moderasi beragam mahasiswa baru di PTKN dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan sudut pandang keagamaan

- Pola tren menunjukkan identitas atribut keagamaan
- Indikasi sikap intoleran di kalangan civitas akademika
- Ada keinginan menghilangkan polarisasi organisasi dan paham keagamaan.
- Ada larangan dalam mengimplementasikan paham keagamaan (mengenakan cadar).
- Resistensi terhadap paham moderasi beragama

Rekomendasi Kebijakan

Langkah-langkah kebijakan yang dapat direkomendasikan dalam penguatan moderasi beragama pada mahasiswa baru. Komitmen Kebangsaan untuk memperkuat komitmen kebangsaan pada mahasiswa baru, beberapa langkah dapat diambil:

- Program orientasi atau kursus-khusus bisa dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi. Ini bisa berupa pembelajaran tentang kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah perjuangan, dan prinsip-prinsip yang mendasari negara dan bangsa mereka.
- Mengadakan kegiatan seperti seminar, diskusi, atau acara kebangsaan yang melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pembicaraan tentang identitas nasional, pluralisme, dan kesatuan. Mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ini agar dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya komitmen kebangsaan.
- Memfasilitasi kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial atau kegiatan relawan yang berfokus pada membangun komunitas lokal atau mendukung kepentingan bersama dalam negara. Ini dapat membantu mereka merasakan keterlibatan langsung dalam memperkuat kesatuan dan komitmen kebangsaan.
- Mendorong diskusi terbuka tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang di antara mahasiswa dari berbagai wilayah atau latar belakang etnis. Ini bisa membuka pikiran mereka tentang

keragaman yang ada dalam negara dan memperkuat pengertian akan pentingnya persatuan dalam perbedaan.

- Mendukung penciptaan ruang penghormatan di kampus agar mahasiswa merasa didengar dan dihargai, serta mempromosikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas dapat membantu dalam memperkuat komitmen kebangsaan.
- Program pengembangan karakter yang mempromosikan nilai-nilai seperti kepemimpinan yang bertanggung jawab, toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan juga penting dalam memperkuat kesadaran akan komitmen kebangsaan.

Melalui pendekatan yang holistik dan beragam seperti ini, mahasiswa baru dapat lebih terlibat dan menyadari pentingnya komitmen mereka terhadap negara dan bangsa.

Toleransi

Untuk memperkuat sikap anti kekerasan pada mahasiswa baru, langkah-langkah berikut dapat diterapkan:

- Membangun pemahaman yang kuat tentang dampak negatif kekerasan melalui program pendidikan, seminar, atau kursus khusus. Ini bisa mencakup studi kasus, diskusi, dan materi pembelajaran yang menyoroti konsekuensi sosial, psikologis, dan fisik dari kekerasan.
- Memberikan dukungan dan sumber daya untuk kesehatan mental dan kesejahteraan mahasiswa. Kekerasan tidak selalu bersifat fisik; ini juga bisa termasuk kekerasan verbal, psikologis, atau emosional. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental, kita dapat meminimalkan risiko konflik yang berujung pada kekerasan.
- Menyediakan pelatihan keterampilan manajemen konflik dan resolusi. Mahasiswa perlu diajari cara berkomunikasi dengan efektif dan menyelesaikan konflik tanpa harus menggunakan kekerasan. Pelatihan seperti ini bisa mengajarkan mereka cara menemukan solusi damai dalam berbagai situasi.

- Mendorong partisipasi dalam kegiatan dan inisiatif yang mempromosikan budaya damai. Pameran seni, diskusi tentang perdamaian, atau proyek pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis bisa menjadi sarana untuk memperkuat sikap anti kekerasan.
- Edukasi tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup tanpa kekerasan, adalah langkah penting. Ini dapat memberikan pemahaman yang kuat bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan damai.
- Penting untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait anti kekerasan di lingkungan kampus, serta memastikan untuk diterapkan secara konsisten. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah untuk mencegah kekerasan, mendukung korban, dan menindak tegas pelaku kekerasan.

Dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, memberikan pemahaman yang luas tentang konsekuensi kekerasan, dan menyediakan sumber daya untuk menangani konflik secara damai, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan sikap anti kekerasan di lingkungan kampus dan di luar kampus.

Penghargaan terhadap Tradisi Lokal

Mahasiswa baru dapat melakukan berbagai hal untuk menghargai budaya lokal di sekitar lingkungan kampus mereka:

- Menghadiri acara-acara budaya, festival, pameran seni, atau pertunjukan tradisional yang diadakan di komunitas masyarakat. Ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami dan mengalami kekayaan budaya yang ada di sekitar mereka.
- Melakukan kegiatan kolaboratif dengan komunitas lokal seperti penguatan pengetahuan, pameran, atau lokakarya yang melibatkan kearifan lokal. Hal ini memberi penguatan mahasiswa untuk belajar dari praktik budaya dan kearifan lokal secara langsung.

- Mengundang tokoh atau ahli dari komunitas setempat untuk memberikan kuliah atau diskusi panel tentang budaya lokal, tradisi, sejarah, atau kearifan lokal lainnya. Ini akan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan wawasan langsung dari sumber yang berkompeten.
- Melakukan penelitian atau proyek edukasi tentang budaya lokal, yang dapat berupa dokumentasi, pengumpulan cerita rakyat, atau studi tentang tradisi lokal. Ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mahasiswa, tetapi juga bisa menjadi sumbangan berharga bagi pelestarian budaya.
- Mendorong mahasiswa untuk membeli produk lokal, seperti kerajinan tangan atau produk pertanian lokal. Ini tidak hanya memberikan dukungan ekonomi kepada komunitas lokal, tetapi juga memperlihatkan penghargaan terhadap keterampilan dan tradisi lokal.
- Budaya seringkali terkait erat dengan lingkungan sekitarnya, mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan konservasi alam atau lingkungan yang secara tidak langsung membantu memelihara budaya lokal yang bergantung pada lingkungan tersebut.

Melalui keterlibatan aktif dan menghormati budaya lokal, mahasiswa baru dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan penghargaan, pelestarian, dan pemahaman yang lebih baik terhadap warisan budaya di sekitar mereka.

Kesimpulan

Mahasiswa dapat membangun kesadaran tentang pentingnya komitmen kebangsaan, menumbuhkan toleransi, anti kekerasan, serta menghargai keragaman budaya lokal, dengan memahami nilai-nilainya, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan beberapa pendekatan:

- Program pendidikan yang mencakup pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan, pentingnya toleransi, penolakan terhadap kekerasan,

dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya lokal adalah pondasi penting untuk membentuk sikap yang inklusif.

- Mahasiswa harus aktif terlibat dalam kegiatan yang mendukung nilai-nilai tersebut. Ini mencakup kegiatan orientasi, seminar, diskusi, atau program pelayanan masyarakat yang menggabungkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik nyata.
- Melalui pengalaman langsung seperti menghadiri acara budaya lokal, berkolaborasi dengan komunitas, atau mengundang tokoh lokal, mahasiswa dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan pengalaman yang memperkuat penghargaan terhadap budaya dan nilai-nilai yang dibahas.
- Pendekatan yang holistik melibatkan unsur-unsur pendidikan, dialog terbuka, keterlibatan dalam kegiatan positif, dukungan institusi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan budaya sebagai cara untuk memperkuat sikap-sikap yang diinginkan.

Beberapa penguatan moderasi beragama yang dapat dilakukan dikampus:

- Revitalisasi struktur dan sosialisasi eksistensi kelembagaan, serta penguatan program kerja.
- Mendorong regulasi program KKN moderasi beragama (internal) dan menyusun juknis KKN moderasi beragama tematik
- Membentuk wadah jurnal moderasi beragama.
- Membangun jejaring dengan stakeholder dan membuat MoU
- Menyelenggarakan lomba konten moderasi beragama via media sosial.
- Menyediakan flyer/banner moderasi beragama di setiap fakultas atau jurusan.
- Melakukan lokakarya perumusan integrasi moderasi beragama dalam proses pembelajaran.
- Melakukan audisi duta moderasi beragama bagi mahasiswa, memberikan reward bagi dosen yang memiliki perhatian penguatan moderasi beragama.

- **Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Semua program kegiatan dan produk kelitbang telah dipublikasikan di website Balai Litbang Agama Makassar baik dalam bentuk berita maupun naskah policypaper dengan alamat <https://www.blamakassar.web.id/>.

1) Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan.

- Jumlah penelitian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan(*policy paper*).

Pada indikator kinerja ini Balai Litbang Agama Makassar menarget 1 (satu) policy paper, dan dapat merealisasikan 1 (dua) buah policy paper, dengan pencapaian nilai kinerja 100%.

Adapun policy papernya berjudul:

1. Orientasi Modersis Beragama

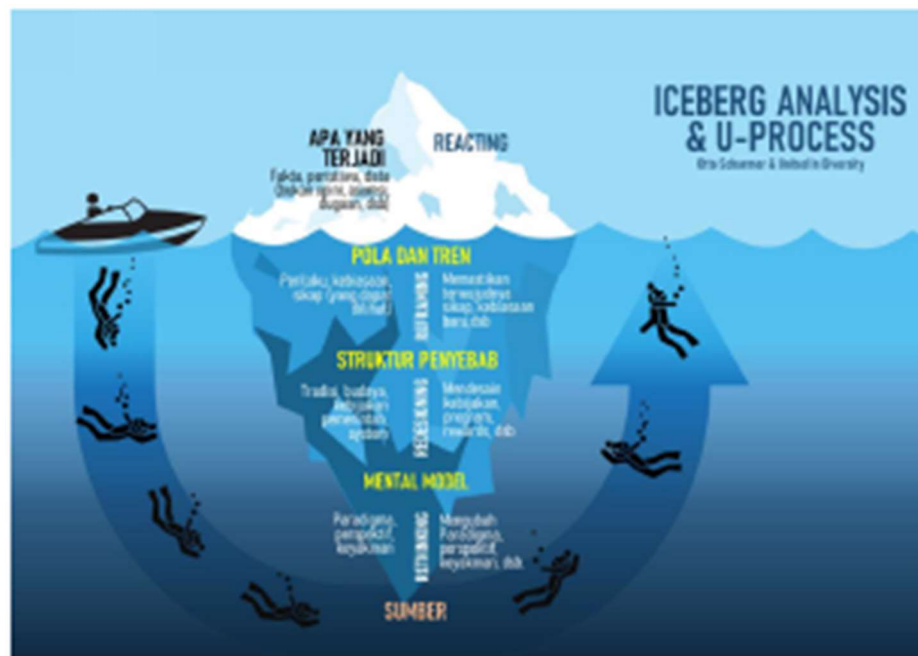
Deskripsi Masalah

Ada 2 (dua) aspek yang diperhatikan dalam orientasi menuju penguatan moderasi beragama, pertama adalah mental model ASN dan PPPK yang mengikuti orientasi, dan kedua adalah menekan sikap dan praktik keagamaan yang berlebihan (ekstrem) serta klaim kebenaran yang subjektif.

Mental model dapat dilihat dari analisis Iceberg yang merupakan konsep seperti gumpalan es yang sebagian besar terendam di bawah permukaan air, begitu juga banyak faktor yang tidak terlihat secara langsung dalam suatu situasi atau permasalahan. Permukaan air hanya mewakili bagian kecil dari keseluruhan gambar, sementara bagian yang lebih besar tersembunyi di bawahnya. Dalam konteks psikologi, konsep ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa perilaku atau tindakan seseorang hanya merupakan manifestasi dari faktor-faktor yang lebih dalam seperti nilai-nilai, kepercayaan, pengalaman masa lalu, dan emosi yang tidak selalu terlihat oleh orang lain.

Dalam ekonomi, analisis iceberg dapat mengacu pada ide bahwa biaya atau dampak suatu keputusan atau perubahan mungkin jauh lebih besar daripada yang terlihat pada permukaan. Misalnya, dalam analisis biaya manfaat, biaya tambahan atau dampak yang lebih luas sering kali tidak langsung terlihat.

Dalam ilmu sosial, analisis iceberg dapat digunakan untuk menggambarkan bahwa banyak masalah sosial atau budaya yang hanya terlihat dalam tindakan atau peristiwa tertentu, tetapi memiliki akar penyebab yang lebih dalam seperti struktur sosial, norma budaya, atau sejarah.



Mental model yang perlu diperhatikan adalah masih kurangnya penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat yang belum terjabarkan dalam memahami keberagaman secara luas, aspek pendidikan dan kesadaran bertoleransi yang belum merata, partisipasi dan dialog yang belum masif dilakukan, serta pelibatan masyarakat dan stakeholder yang belum maksimal dalam membangun kerukunan pada keberagaman.

Sikap dan praktik keagamaan yang berlebihan (ekstrem) serta klaim kebenaran yang subyektif dapat menimbulkan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh

kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik, serta menimbulkan kerawanan dan mengikis ketahanan kerukunan di masyarakat.

Model mental yang salah dalam membangun kerukunan di masyarakat dapat menghambat perkembangan harmoni, pengertian, dan kehidupan bersama yang damai antara berbagai kelompok. Berikut adalah model mental yang dapat merusak upaya membangun kerukunan:

- Prasangka dan stereotip adalah penilaian negatif atau sikap tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu. Stereotip, di sisi lain, adalah gambaran umum yang tidak akurat tentang kelompok tertentu. Prasangka dan stereotip menghasilkan pemahaman yang dangkal dan tidak akurat tentang kelompok lain, yang dapat merusak hubungan antar kelompok.
- Diskriminasi terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara tidak adil berdasarkan atribut tertentu, seperti ras, agama, atau gender. Ini bisa mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat.
- Etnosentrisme adalah pandangan bahwa kelompok etnis atau budaya sendiri lebih baik atau lebih unggul daripada kelompok lain. Ini dapat menghambat penghargaan terhadap keberagaman dan menghasilkan sikap meremehkan terhadap kelompok lain.
- Ketika seseorang atau kelompok mengadopsi pandangan agama atau ideologi secara ekstrem, ini dapat menyebabkan ketidaktoleranan terhadap pandangan dan keyakinan lain. Fanatisme dapat memicu konflik dan menimbulkan ancaman terhadap kerukunan.
- Model mental yang memandang dunia dalam perspektif hitam-putih dan menolak untuk memahami nuansa dan kompleksitas dapat menyebabkan polarisasi. Sikap yang mengedepankan

konfrontasi daripada dialog dapat merusak komunikasi yang konstruktif antar kelompok.

- Ketidapahaman tentang budaya dan agama lain dapat menghasilkan interpretasi yang keliru dan kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Ini sering kali karena kurangnya pendidikan dan interaksi antar kelompok.
- Rasa takut terhadap yang tidak diketahui atau ketidakpastian tentang kelompok lain dapat memicu sikap defensif atau bahkan agresif. Rasa takut ini dapat diperparah oleh ketidakmengertian.
- Kelompok ekstremis dapat memanfaatkan propaganda untuk menghasut sentimen anti-kelompok lain. Ini dapat memperburuk ketegangan dan menghalangi upaya membangun kerukunan.
- Pemahaman yang terlalu individualistik dapat mengabaikan pentingnya kerjasama dan ketergantungan antar kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat merusak solidaritas sosial.
- Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat memicu ketidakpuasan dan ketegangan antar kelompok. Ketidakadilan ini dapat diarahkan menjadi konflik yang merusak kerukunan.

Rekomendasi Kebijakan

Langkah-langkah kebijakan yang dapat direkomendasikan dalam penguatan moderasi beragama pada program orientasi.

Rethinking (berpikir ulang) tentang kerukunan dan toleransi melibatkan pergeseran dalam cara kita memahami, mengartikan, dan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Ini berarti mengubah perspektif dan paradigma tradisional kita untuk lebih memahami dinamika yang lebih mendalam, dan mungkin mengenai cara-cara baru untuk mempromosikan kerukunan dan toleransi yang lebih efektif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang hal ini :

- Kerukunan dan toleransi adalah konsep yang sangat penting dalam masyarakat modern, yang membuatnya lebih kompleks dan beragam. Kita harus mengubah perspektif dan paradigma tradisional kita untuk lebih memahami dinamika yang lebih mendalam, dan mungkin mengenai cara-cara baru untuk mempromosikan kerukunan dan toleransi yang lebih efektif
- Memahami Keragaman yang Lebih Luas: Rethinking tentang kerukunan dan toleransi melibatkan mengakui keragaman yang lebih luas dalam masyarakat kita. Ini mencakup keragaman etnis, budaya, agama, orientasi seksual, identitas gender, dan banyak lagi. Paradigma baru harus menganggap keragaman ini sebagai sumber kekayaan dan kemajuan, bukan sebagai tantangan atau ancaman.
- Menggali Akar yang tidak toleranan: Sebagai bagian dari pendekatan rethinking, penting untuk menggali akar penyebab ketidak-toleranan dan konflik. Ini melibatkan pengenalan terhadap faktor-faktor seperti ketidaksetaraan sosial, pengetahuan yang terbatas, pengalaman masa lalu, dan isu-isu struktural yang mungkin memengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap kelompok lain.
- Pendidikan dan Kesadaran: Paradigma baru tentang kerukunan dan toleransi harus mengakui pentingnya pendidikan dan kesadaran yang lebih tinggi. Pendidikan yang terfokus pada pemahaman lintas budaya, sejarah kelompok lain, dan nilai-nilai bersama dapat membantu mengatasi prasangka dan stereotip.
- Partisipasi Masyarakat dan Dialog: Rethinking juga mengarah pada mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam dialog yang terbuka dan jujur. Ini memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka, membangun pemahaman bersama, dan merumuskan solusi bersama.

- Menghargai Persamaan dan Perbedaan: Pendekatan baru tentang kerukunan dan toleransi harus mengajarkan tentang menghargai persamaan dan perbedaan di antara kita. Ini mencakup mengakui nilai-nilai universal seperti martabat manusia, keadilan, dan hak asasi manusia, sambil juga menghormati keberagaman dalam pandangan hidup dan praktik agama.
- Kekuatan Keterlibatan Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi. Paradigma baru harus mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengadvokasi hak-hak individu, membangun jaringan lintas budaya, dan merespon situasi konflik dengan solusi yang konstruktif.
- Sumber daya tambahan untuk mendukung pemikiran ulang tentang kerukunan dan toleransi bisa termasuk buku-buku, artikel akademis, penelitian interdisipliner, dan konferensi internasional tentang topik ini. Dengan berpikir ulang dan mengadopsi paradigma baru, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan berkelanjutan.

Redesigning (merancang ulang) kebijakan untuk memperkuat kerukunan melibatkan pendekatan yang lebih holistik, inovatif, dan responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan politik yang terus berubah. Tujuan dari perancangan ulang ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja kebijakan yang lebih efektif dalam mempromosikan harmoni, dialog, dan kerja sama antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa komponen penting dari pendekatan perancangan ulang kebijakan memperkuat kerukunan:

Partisipasi dan Keterlibatan Multistakeholder: Melibatkan berbagai pihak dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan

kerukunan adalah kunci. Ini mencakup pemerintah, masyarakat sipil, lembaga agama, kelompok etnis, organisasi pemuda, dan sektor swasta. Keterlibatan semua pihak yang terlibat akan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mencerminkan berbagai perspektif.

- Analisis Kerawanan dan Ketahanan Kerukunan: Perancangan ulang kebijakan harus didasarkan pada analisis menyeluruh tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerukunan serta potensi risiko konflik. Ini akan membantu mengidentifikasi wilayah yang memerlukan intervensi khusus dan mendukung pengembangan strategi yang lebih efektif.
- Pendidikan dan Pelatihan Lintas Budaya: Kebijakan perancangan ulang harus menyertakan upaya untuk memperkuat pendidikan lintas budaya di sekolah dan masyarakat. Ini melibatkan pengembangan kurikulum yang mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap berbagai budaya, serta pelatihan untuk guru dan fasilitator dalam mengatasi prasangka dan stereotip.
- Fasilitasi Dialog dan Pertukaran: Kebijakan perancangan ulang harus mendorong dan mendukung dialog terbuka antara kelompok-kelompok yang berbeda. Inisiatif seperti forum dialog, pertemuan komunitas, dan program pertukaran budaya dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok tersebut.
- Promosi Keterwakilan dan Kesenjangan: Kebijakan harus merancang mekanisme yang mendorong keterwakilan yang adil dan inklusif dalam lembaga-lembaga publik, organisasi masyarakat, dan tempat kerja. Keterlibatan berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan akan membangun rasa memiliki dan merasa dihargai.
- Pemberdayaan Masyarakat: Kebijakan perancangan ulang harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan

memberikan dukungan untuk inisiatif lokal yang mempromosikan kerukunan. Ini dapat termasuk proyek budaya bersama, pelatihan kewirausahaan, dan program sosial ekonomi yang memperkuat keterhubungan antara anggota masyarakat.

- **Pengembangan Keterampilan Komunikasi Antarbudaya:** Kebijakan harus mendukung pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih baik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Pelatihan dalam komunikasi lintas budaya, konflik resolusi, dan negosiasi dapat membantu menghindari mispersepsi dan konflik yang tidak perlu.
- **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:** Kebijakan perancangan ulang harus mencakup mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari strategi-strategi yang diimplementasikan. Evaluasi yang berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan perubahan yang diperlukan dalam perjalanan waktu.
- **Penegakan Hukum yang Adil:** Kebijakan perancangan ulang harus mencakup aspek penegakan hukum yang memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mengatasi tindakan diskriminasi atau intoleransi. Penegakan hukum yang adil memberikan sinyal bahwa pelanggaran terhadap kerukunan tidak akan ditoleransi.
- Melalui perancangan ulang kebijakan yang terfokus pada pendekatan inklusif, pendidikan, dialog, dan partisipasi masyarakat, kita dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif dalam memperkuat kerukunan di masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

Reframing Sikap, kita dapat melihat sikap sebagai refleksi dari pengetahuan, pengalaman, dan persepsi masyarakat terhadap dunia di sekitarnya. Daripada menganggap sikap yang berbeda sebagai suatu ancaman, kita dapat merestruktur sikap sebagai

peluang untuk berbagi perspektif yang beragam. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang unik, kita dapat melihat sikap sebagai pintu masuk untuk berdialog dan menggali pemahaman yang lebih dalam.

- Prilaku adalah tindakan konkret yang mencerminkan nilai dan keyakinan seseorang. Dalam konteks reframing, kita dapat melihat prilaku sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor internal dan eksternal. Alih-alih langsung menghakimi prilaku yang tidak kita pahami, kita dapat merangkul pandangan bahwa setiap prilaku memiliki motivasi dan asal-usulnya sendiri. Dengan memulai dialog yang terbuka dan empatik, kita dapat merubah prilaku yang bertentangan dengan kerukunan menjadi peluang untuk saling belajar dan tumbuh.
- Kebiasaan adalah pola perulangan prilaku yang telah tertanam dalam rutinitas sehari-hari. Melalui reframing, kita bisa melihat kebiasaan sebagai cerminan dari lingkungan sosial dan budaya. Sebagai gantinya, kita dapat mengubah sudut pandang kita untuk melihat kebiasaan sebagai potensi untuk membangun jembatan antara kelompok yang berbeda. Dengan mempromosikan kebiasaan inklusif dan menghargai perbedaan, kita dapat membentuk kebiasaan yang memperkuat hubungan yang harmonis dan mengedepankan nilai-nilai toleransi.
- Dengan mengadopsi pendekatan reframing terhadap sikap, prilaku, dan kebiasaan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah, terbuka, dan penuh pengertian. Ini memungkinkan kita untuk mengatasi konflik dengan lebih efektif, mempromosikan dialog yang produktif, dan membangun dasar yang kokoh untuk kerukunan dan toleransi yang berkelanjutan.

Reacting, dalam konteks membangun kerukunan dan toleransi, mengacu pada cara kita merespon tindakan, ucapan, atau situasi yang berkaitan dengan perbedaan dan konflik. Cara kita merespon ini sangat berpengaruh dalam membentuk dinamika sosial dan hubungan antarindividu atau kelompok. Berikut adalah beberapa prinsip penting terkait dengan "reacting" untuk memperkuat kerukunan dan toleransi:

- Respon yang didasarkan pada empati akan membantu kita memahami perasaan dan perspektif orang lain. Ketika kita merasa empati terhadap pengalaman dan pandangan orang lain, kita lebih mungkin untuk merespon dengan pengertian daripada pertentangan.
- Merespon dengan cara yang tidak konfrontatif akan membantu mencegah eskalasi konflik. Ini melibatkan berbicara dengan tenang, menghindari bahasa yang merendahkan atau mengejek, dan fokus pada komunikasi yang terbuka.
- Reaksi yang baik memerlukan komunikasi yang efektif. Dengarkan dengan seksama apa yang orang lain sampaikan, dan jika diperlukan, tanyakan untuk klarifikasi sebelum merespons. Hindari asumsi atau interpretasi yang tergesa-gesa.
- Reaksi yang positif terhadap perbedaan sering kali didorong oleh pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya, agama, dan nilai-nilai orang lain. Pendidikan adalah kunci untuk mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin muncul.
- Ketika kita dihadapkan pada pandangan atau informasi baru, bersikap terbuka untuk belajar dan menggali lebih dalam. Ini membantu menghindari pandangan sempit dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia yang beragam.
- Respon kita terhadap situasi konflik dan perbedaan akan mempengaruhi orang di sekitar kita. Dengan menjadi contoh yang positif dalam merespon tantangan, kita dapat

mempengaruhi orang lain untuk berperilaku dengan lebih toleran dan terbuka.

- Dalam situasi di mana konflik tak terhindarkan, penting untuk merespon dengan cara yang konstruktif. Fokus pada solusi yang mempromosikan pemahaman saling, dan hindari menyalahkan pihak lain.
- Saat merespon perbedaan, fokus pada nilai-nilai dan tujuan bersama yang dapat mempersatukan individu atau kelompok. Ini membantu menghindari polarisasi dan mendorong kerja sama.
- Reaksi kita dapat membentuk hubungan jangka panjang. Dengan merespon secara positif dan menghormati, kita dapat membangun jaringan sosial yang inklusif dan mendukung kerukunan.

Kesimpulan

Mengubah model mental masyarakat yang berkaitan dengan paradigma, perspektif, dan pemahaman yang keliru tentang kerukunan dan toleransi merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Proses ini melibatkan pendidikan, komunikasi, pembukaan wawasan, dan pembentukan contoh-contoh positif. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat mental model dan menekan sikap dan praktik keagamaan yang berlebihan (ekstrem) serta klaim kebenaran yang subyektif dapat menimbulkan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik.

Salah satu langkah awal adalah memberikan pendidikan tentang nilai-nilai kerukunan dan toleransi. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan informal di sekolah, perguruan tinggi, lembaga agama, dan masyarakat. Materi-materi ini harus mencakup pemahaman tentang perbedaan

budaya, agama, dan latar belakang sosial serta pentingnya menghormati perbedaan tersebut.

- Fasilitasi dialog terbuka dan sehat di antara berbagai kelompok masyarakat sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, diskusi panel, dan acara-acara serupa yang memungkinkan orang untuk berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan pandangan mereka. Hal ini akan membantu mengatasi prasangka dan stereotip yang mungkin muncul akibat ketidaktahuan.
- Mempelajari sejarah dan budaya berbagai kelompok masyarakat dapat membantu meruntuhkan persepsi keliru. Ketika orang memahami akar sejarah dan nilai-nilai budaya orang lain, mereka lebih cenderung menghormati dan menghargai perbedaan tersebut.
- Media memiliki peran besar dalam membentuk pandangan masyarakat. Oleh karena itu, menyebarkan konten yang menggambarkan kerukunan dan toleransi dapat membantu mengubah citra yang keliru. Film, program televisi, artikel, dan kampanye sosial dapat membantu merangkul keberagaman dan mendorong pemahaman yang lebih baik.
- Pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik memiliki pengaruh yang kuat dalam mengubah pola pikir masyarakat. Ketika mereka secara aktif mempromosikan kerukunan dan toleransi, ini akan memberikan contoh positif dan mendorong pengikut mereka untuk mengikuti jejak yang sama.
- Menggalang kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, atau kemanusiaan dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan meruntuhkan batasan-batasan yang ada.
- Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang kerukunan dan toleransi

melalui pendekatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengajaran nilai-nilai ini dalam sistem pendidikan dan media.

B. Capaian Output Program/Kegiatan Tahun 2023

**Tabel
Capaian Rincian Output (RO)**

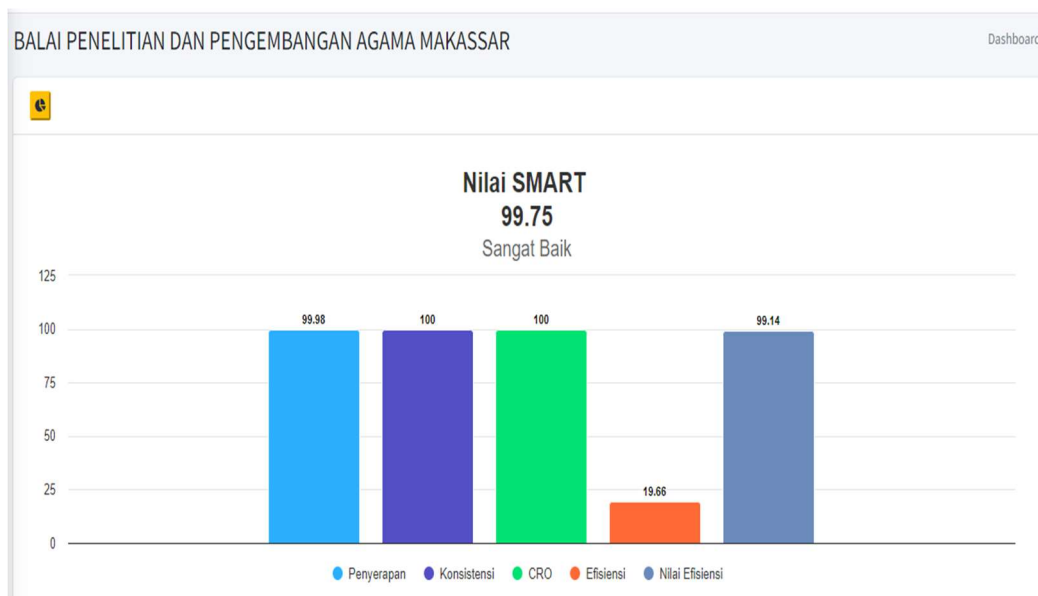
No.	Kegiatan/KRO/RO	Pagu	Target	Realisasi Fisik/ Output			Realisasi Anggaran	
			Vol.	Vol.	%	Rp.	%	
1	Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	2.555.292.000				2.555.083.625	99.99%	
	Komunikasi Publik	289.809.000	1	2	200%	289.909.300	99.93%	
	Rekomendasi/Hail Penelitian Bimas Agama, Layanan Keagamaan dan Indikator Kinerja Umat Kementerian Agama	2.265.483.000	3	5	166%	2.265.474.315	100.00%	
2	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1.223.435.000	4	5	125%	1.223.429.500	100,00%	
3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	2.543.052.000			166%	2.541.127.000	99.92%	
	Komunikasi Publik	1.402.589.000	1	4	400%	1.402.572.135	100.00%	

	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.140.463.000	3	5	166%	1.138.554.902	99.83%
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	7.318.549.000	28	37	123%	7.318.255.034	100.00%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	643,531.000	25	32	100%	643,531.000	100.00%
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	132.277.000	1	1	100%	132.277.000	100.00%
5	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	889.113.000				889.109.833	100.00%
	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	253.334.000	1	2	200%	253.332.400	100.00%
	Komunikasi Publik	635.779.000	1	2	200%	635.777.433	100.00%

C. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023

Nilai kinerja anggaran tahun 2023, adalah nilai yang diambil dari laporan aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan Republik Indonesia sampai dengan 31 Desember 2023.

Berikut kami sampaikan grafik dan data dari aplikasi SMART DJA :



Dari garfik di atas menggambarkan, dari data-data yang telah diinput menunjukkan Balai Litbang Agama Makassar berada berada pada Nilai Kinerja Anggaran SMART 99.75 dengan rincian perentasei penyerapan sebesar 99.98%, Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) 100%, realisasi atau Capaian Rincian Outpu (CRO) berada pada nilai 100%, dengan efisiensi 19,66% dan Nilai efisiensi 99.14%.

BAB V

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala

Secara umum pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dapat diidentifikasi, antara lain :

1. Terdapat anggaran blokir AA yang baru terbuka dipertengahan tahun anggaran.
2. Sebagian program, baru bisa berjalan pada bulan Maret – April 2023
3. Banyaknya Revisi DIPA akibat dari anggaran yang terblokir Automatic Adjustment (AA) dan baru dibuka pada Pertengahan tahun 2023.
4. Terdapat sejumlah kegiatan yang pelaksanaan menunggu jadwal dari Pusat.
5. Penyesuaian terhadap Aplikasi SAKTI.

B. Solusi

Terhadap semua kendala dan hambatan yang dihadapi telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana berikut:

1. Melakukan penjadwalan dan pengetatan ulang terhadap jadwal yang telah di rencanakan.
2. Melakukan kajian mendalam terhadap tahapan jadwal kegiatan yang telah dibuat dengan melakukan revisi secara cermat terhadap rincian kegiatan-kegiatan.
3. Menentukan skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang tetap dipertahankan, dengan merubah lokasi penelitian tanpa mengabaikan substansi.
4. Melakukan konsultasi secara intens dengan lembaga terkait yaitu KPPN Makassar II.

BAB VI PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran BLA Makassar tahun 2023 disajikan. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja BLA Makassar dimasa yang akan datang, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai amal usaha dan asil kerja kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.